



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PENGAMBENGAN
TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2025

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

Disetujui oleh :

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pengambangan

Kartono

Jembrana, 15 Januari 2025

Disusun oleh :

Ketua Tim
Kepala Sub Bagian Umum

Lukman Hadi

KATA PENGANTAR



Mengacu pada dan RKT Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2025 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*base line*) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan Tahun 2025. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 ini disertai dengan Data Dukung Capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan pada Tahun 2025.

Jembrana, 15 Januari 2025

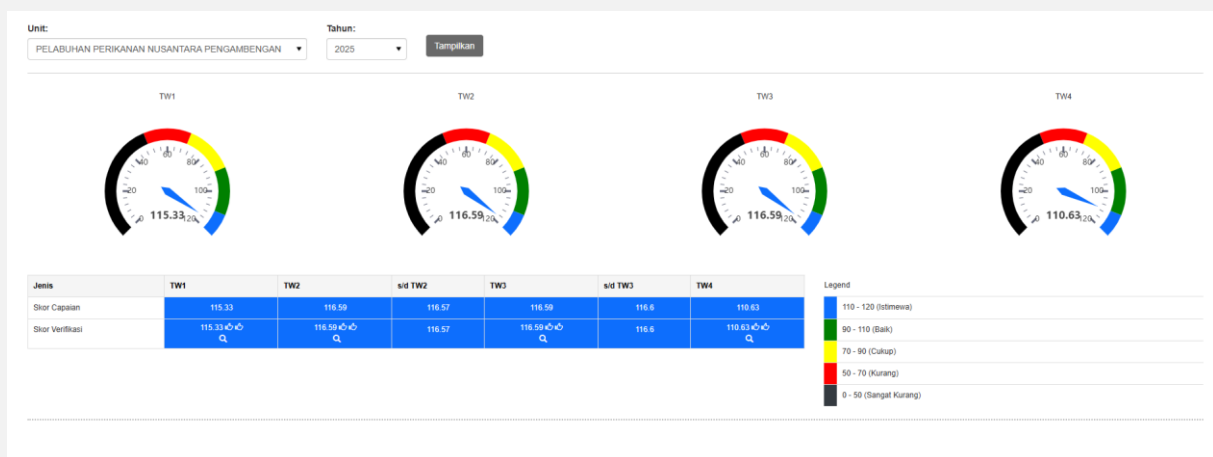
Kepala Pelabuhan



Kartono, A.Pi, M.P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp 257.674.183.000,- pada Tahun 2025, yang terealisasi sebesar Rp 12.542.832.715 ,- atau 4,87 % dari total target penyerapan anggaran pada Tahun 2025. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **110,63%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerja pada Gambar 1)



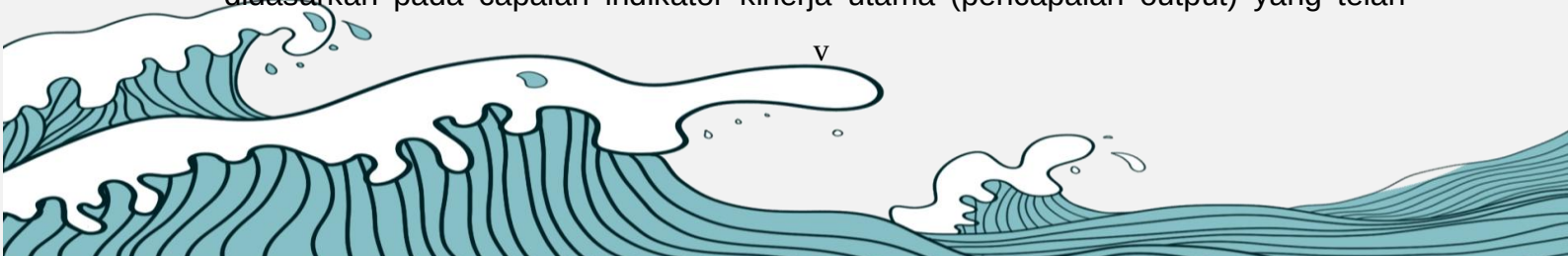
Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

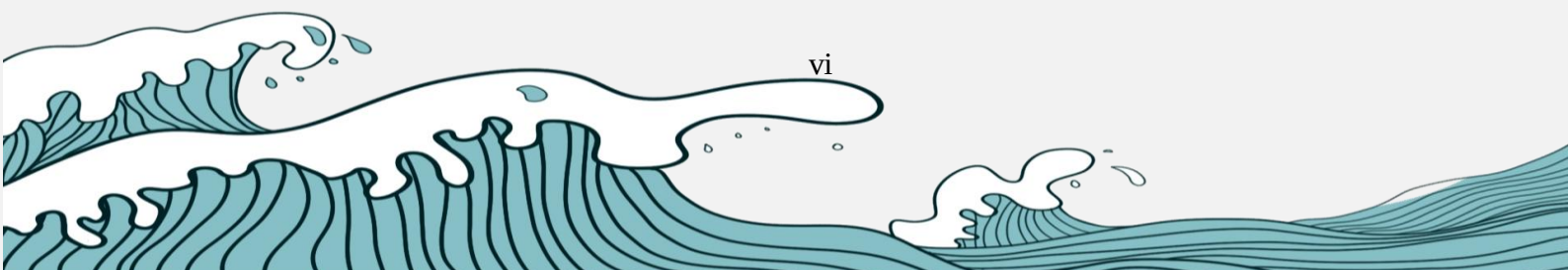
1. IKS.1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)
2. IKS.02.1 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
3. IKS.03.1 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)

4. IKS.03.2 Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
5. IKS.03.3 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
6. IKS.03.4 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
7. IKS.03.5 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
8. IKS.04.1 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
9. IKS.04.2 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
10. IKS.05.1 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
11. IKS.05.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
12. IKS.05.3 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
13. IKS.05.4 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)
14. IKS.05.5 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
15. IKS.05.6 Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
16. IKS.05.7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
17. IKS.05.8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
18. IKS.05.9 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah



diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.



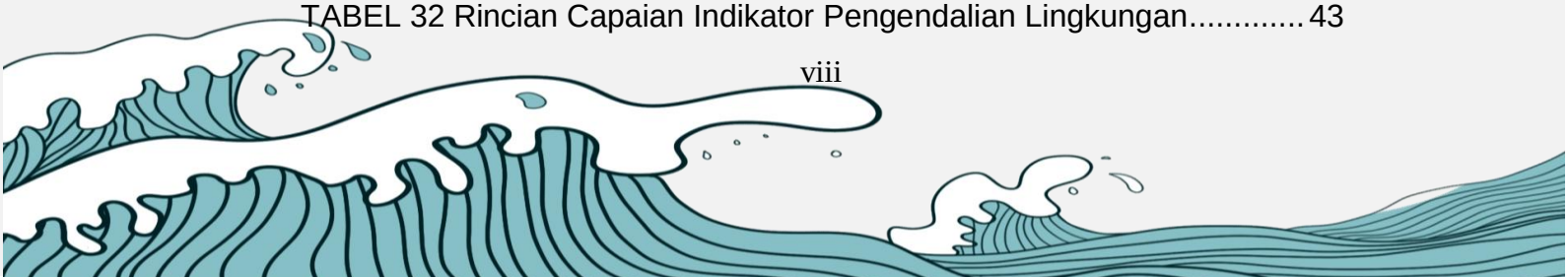
DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	5
E. SDM Aparatur PPN Pengembangan.....	6
F. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Pembangunan Perikanan Tangkap.....	11
B. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	17
C. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Akuntabilitas Keuangan	86
BAB IV. PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	91
C. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	91



DAFTAR TABEL

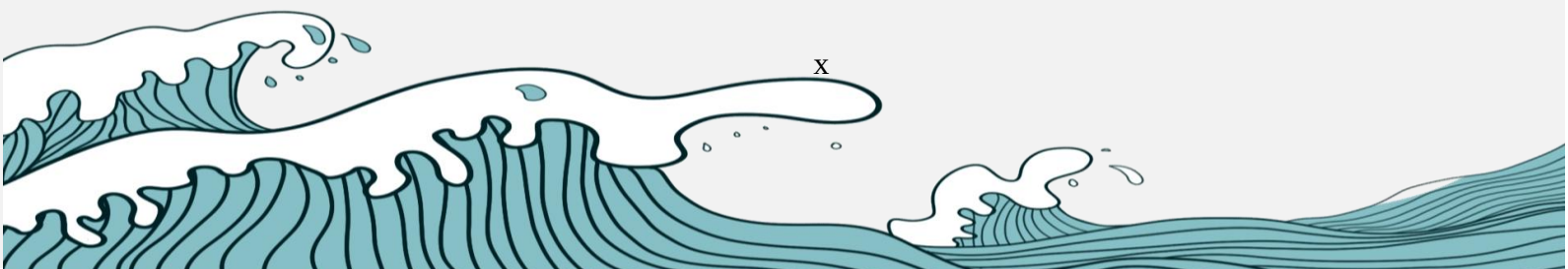
TABEL 1 Komposisi Pegawai Pelabuhan Berdasarkan Golongan	7
TABEL 2 Komposisi Pegawai Pelabuhan Berdasarkan Pendidikan.....	8
TABEL 3 Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Berdasarkan Jenis Kelamin ...	8
TABEL 4 Tabel Informasi Cascading	16
TABEL 5 Target Kinerja Pelabuhan.....	17
TABEL 6 Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran.....	19
TABEL 7 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	21
TABEL 8 Rincian Capaian Indikator PNBPN	23
TABEL 9 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	24
TABEL 10 Perbandingan dengan Satker Lain	24
TABEL 11 Realisasi anggaran mendukung IKU	25
TABEL 12 Rincian Capaian Indikator Volume Produksi.....	27
TABEL 13 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	28
TABEL 14 Perbandingan dengan Satker Lain	28
TABEL 15 Realisasi anggaran mendukung IKU	29
TABEL 16 Rincian Capaian Indikator Permohonan Pengusahaan	30
TABEL 17 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	31
TABEL 18 Perbandingan dengan Satker Lain	31
TABEL 19 Realisasi anggaran mendukung IKU	32
TABEL 20 Rincian Capaian Indikator Tingkat Kinerja.....	33
TABEL 21 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	34
TABEL 22 Perbandingan dengan Satker Lain	34
TABEL 23 Realisasi anggaran mendukung IKU	35
TABEL 24 Rincian Capaian Indikator Pelayanan Kesyahbandaran	36
TABEL 25 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	37
TABEL 26 Perbandingan dengan Satker Lain	37
TABEL 27 Realisasi anggaran mendukung IKU	38
TABEL 28 Rincian Capaian Indikator Pengembangan Fasilitas.....	39
TABEL 29 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	40
TABEL 30 Perbandingan dengan Satker Lain	41
TABEL 31 Realisasi anggaran mendukung IKU	41
TABEL 32 Rincian Capaian Indikator Pengendalian Lingkungan.....	43



TABEL 33 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	44
TABEL 34 Perbandingan dengan Satker Lain	45
TABEL 35 Realisasi anggaran mendukung IKU	45
TABEL 36 Rincian Capaian Indikator Kapal Perikanan.....	47
TABEL 37 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	47
TABEL 38 Perbandingan dengan Satker Lain	48
TABEL 39 Realisasi anggaran mendukung IKU	49
TABEL 40 Rincian Capaian Indikator Awak Kapal Perikanan	50
TABEL 41 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	51
TABEL 42 Perbandingan dengan Satker Lain	51
TABEL 43 Realisasi anggaran mendukung IKU	52
TABEL 44 Rincian Capaian Indikator PM Zona Integritas.....	55
TABEL 45 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	56
TABEL 46 Perbandingan dengan Satker Lain	56
TABEL 47 Realisasi anggaran mendukung IKU	57
TABEL 48 Rincian Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan..	58
TABEL 49 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	59
TABEL 50 Perbandingan dengan Satker Lain	59
TABEL 51 Realisasi anggaran mendukung IKU	60
TABEL 52 Rincian Capaian Indikator Nilai PM SAKIP	61
TABEL 53 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	62
TABEL 54 Perbandingan dengan Satker Lain	62
TABEL 55 Realisasi anggaran mendukung IKU	62
TABEL 56 Rincian Capaian Indikator IP ASN.....	64
TABEL 57 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	64
TABEL 58 Perbandingan dengan Satker Lain	65
TABEL 59 Realisasi anggaran mendukung IKU	65
TABEL 60 Rincian Capaian Indikator Pengadaan PBJ	69
TABEL 61 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	69
TABEL 62 Perbandingan dengan Satker Lain	70
TABEL 63 Realisasi anggaran mendukung IKU	71
TABEL 64 Rincian Capaian Indikator Pengelolaan BMN	72
TABEL 65 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	73
TABEL 66 Perbandingan dengan Satker Lain	73



TABEL 67 Realisasi anggaran mendukung IKU	74
TABEL 68 Rincian Capaian Indikator Nilai IKPA.....	75
TABEL 69 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	76
TABEL 70 Perbandingan dengan Satker Lain	76
TABEL 71 Realisasi anggaran mendukung IKU	77
TABEL 72 Rincian Capaian Indikator NKPA.....	78
TABEL 73 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	79
TABEL 74 Perbandingan dengan Satker Lain	79
TABEL 75 Realisasi anggaran mendukung IKU	81
TABEL 76 Rincian Capaian Indikator Survei Kepuasan Masyarakat	83
TABEL 77 Perbandingan dengan Target Menengah Renstra	84
TABEL 78 Perbandingan dengan Satker Lain	84
TABEL 79 Realisasi anggaran mendukung IKU	85
TABEL 80 Pagu Anggaran	86
TABEL 81 Realisasi Keuangan	87



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Dashboard Pada Aplikasi Kinerjaku	iv
GAMBAR 2 Struktur Organisasi Pelabuhan.....	6
GAMBAR 3 Dashboard Pada Aplikasi Kinerjaku	89

BAB I PENDAHULUAN

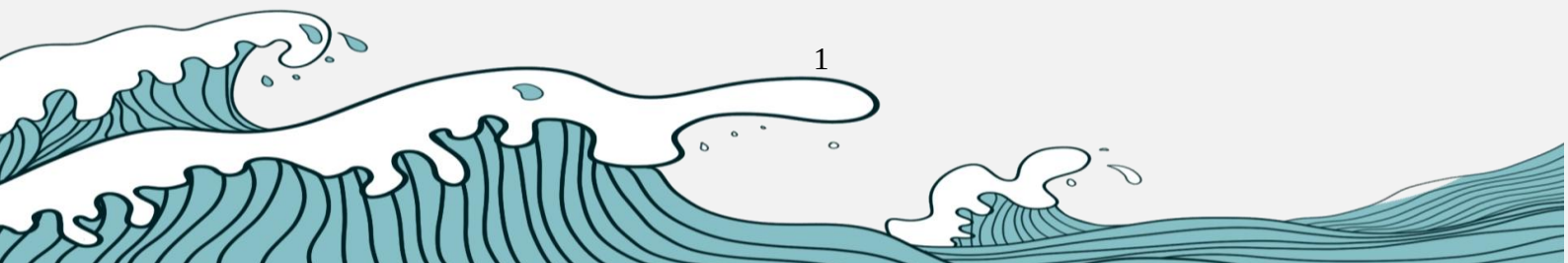
A. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang sangat strategis dan berperan sebagai rumah atau basis utama dalam melaksanakan berbagai program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun tempat untuk mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku pada lingkup KKP yang didasari 3 pilar Misi KKP yaitu **Kedaulatan (Sovereignty)**, **Keberlanjutan (Sustainability)** dan **Kesejahteraan (Prosperity)**. Oleh karena itu, di dalam kawasan Pelabuhan harus tercipta suasana aman, nyaman dan kondusif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan secara baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggung jawab (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh



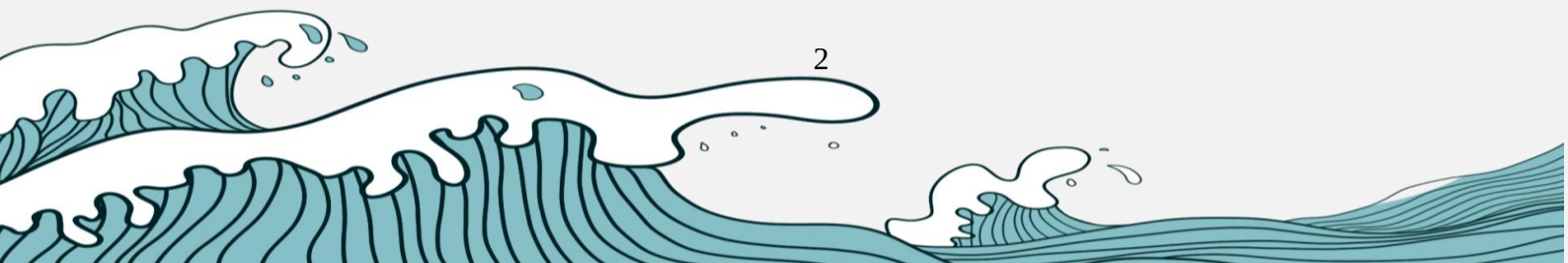
instansi pemerintah agar dilaporkan secara *akuntable* sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran,

keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni: (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang disusun setiap tahun. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang ; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

B. Gambaran Umum

Pembangunan perikanan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Jembrana Provinsi Bali. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat



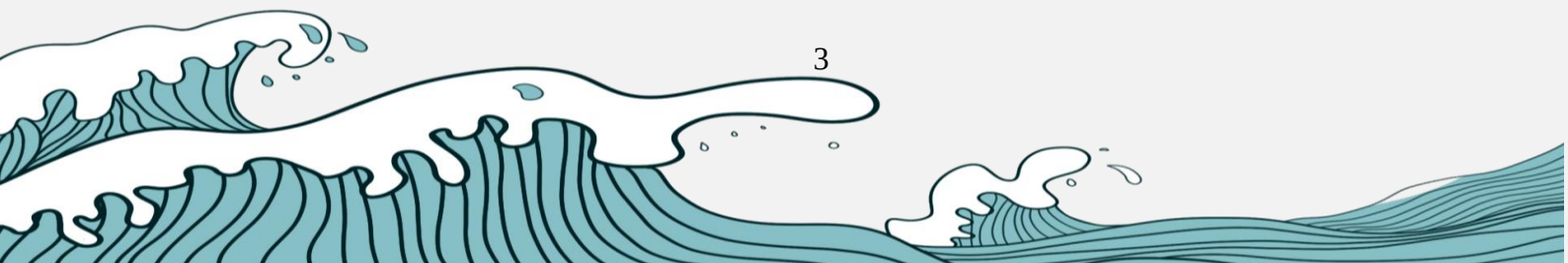
berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Selain itu Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;



12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Fungsi pemerintahan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanan; dan/atau keimigrasian.
- B. Fungsi perusahaan yaitu fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.



D. Struktur Organisasi

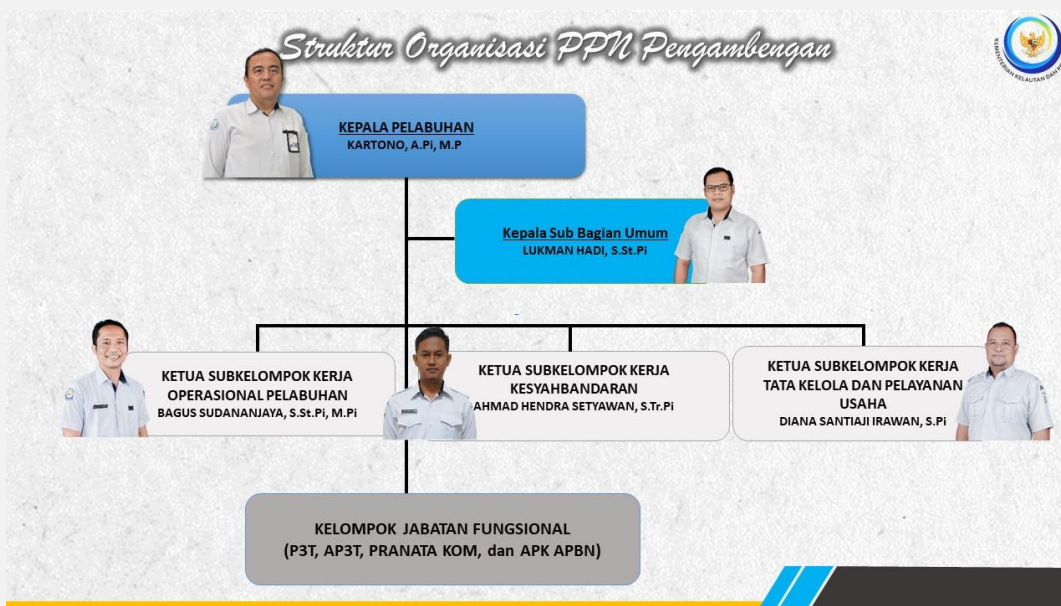
Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
2. Tim Kerja Operasional Pelabuhan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Tim Kerja Kesyahbandaran, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsinya melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti sewa alat berat, sewa lahan, jasa



kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.

5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan terdiri dari Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Pranata Komputer Muda, dan Pranata Keuangan APBN Penyelia.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

E. SDM Aparatur PPN Pengembangan

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan didukung oleh 75 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 38 orang, PPPK sebanyak 18 orang dan Pramubakti sebanyak 37 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Dukungan Manajerial	-	2	7	-	9
3.	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	1	-	-	1
4.	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	5	-	5
5.	Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	-	2	7	-	9
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	6	-	6
	Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	Perencana (Muda)	-	-	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-	-	-	37
Jumlah						75

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	DIII	S1/DIV	S2	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	-	1	1
2.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	-	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Dukungan Manajerial	-	1	1	7	-	9
3.	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	1	-	-	-	1
4.	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	-	-	1	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	-	5	-	5
5.	Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	8	-	9
6.	Jabatan Fungsional Tertentu	-					
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	-	6	-	6
	Pranata Komputer (Muda)	-	-	-	-	1	1
	Perencana (Muda)	-	-	-	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1	21	4	11	-	37
Jumlah							75

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Pelabuhan	1	-	1
2.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Dukungan Manajerial	2	7	9
3.	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	1	-	1

	JFT/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	1	-	1
4.	Tim Kerja Kerja Operasional Pelabuhan	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	3	2	5
5.	Tim Kerja Kerja Kesyahbandaran	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	8	1	9
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	2	4	6
	Pranata Komputer (Muda)	1	-	1
	Perencana (Muda)	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	1	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	23	14	37
Jumlah				75

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) s/d Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini di sajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan.

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2025.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

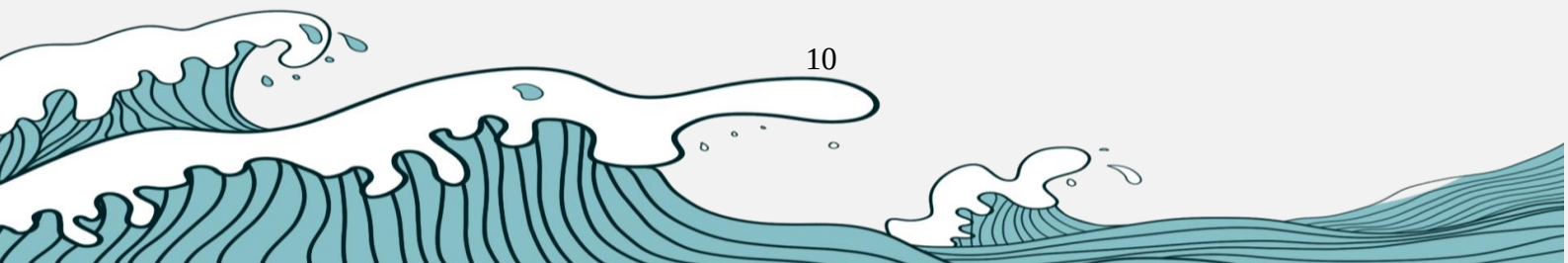
Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, Analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan serta realisasi anggaran.

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6. LAMPIRAN

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Pembangunan Perikanan Tangkap

- **Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Visi Ditjen Perikanan Tangkap adalah “Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Partisipatif, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Nelayan” untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

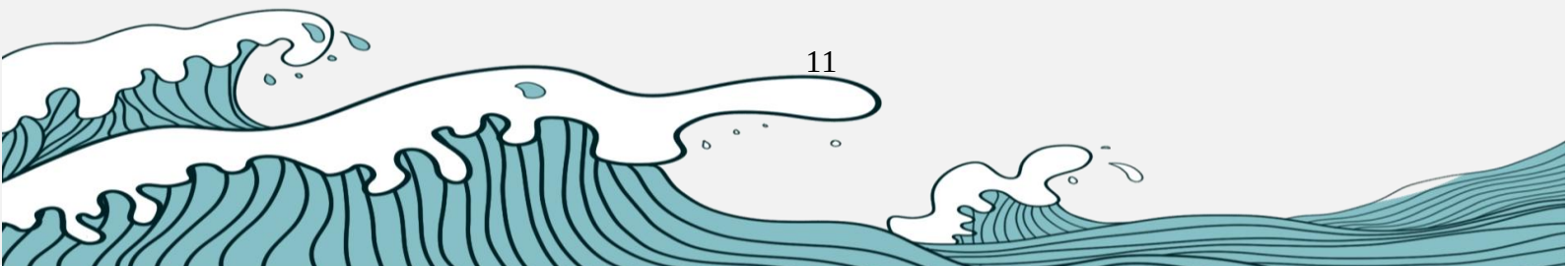
- **Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Ditjen Perikanan Tangkap melakukan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2 : Swasembada pangan dan ekonomi biru.

- **Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan.
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi system logistic hasil tangkapan.
3. Mengembangkan infrastuktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan.
4. Memperkuat kelembagaan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan dan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing
5. Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan.



Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai berikut:

1. Sebagai “Sentra Usaha Mina” artinya bahwa Wilayah PPN Pengembangan Jembrana merupakan sentral bagi kegiatan-kegiatan perikanan dari 5 (lima) TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang ada di Kota Jembrana sepanjang garis pantai 76 km, yang akhirnya akan menjadi Infrastruktur dari Industri Perikanan di masa mendatang.
2. “Yang Berdaya Saing” artinya Hasil Produksi/Tangkapan PPN Pengembangan mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga Produk Perikanan yang dipasarkan stabil. Pada Tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan Pelabuhan tidak hanya sebagai Tempat Pendaratan Ikan, tetapi juga meliputi Penangkapan Ikan, Pelelangan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan. Di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan ke depannya diharapkan adanya industry/perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di mana dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat/nelayan/stakeholder menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang disediakan di PPN Pengembangan Jembrana
2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu dialokasikan pada PPN Pengembangan Jembrana
3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus diusahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk menguji sample ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin



maka ikan tersebut boleh dipasarkan.

4. Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Pengembangan Jembrana adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikan yang di tangkap perhari, per bulan maupun pertahunnya di Kota Jembrana
5. Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih hygienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan di daerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan.
6. Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari di harapkan membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut
7. Meningkatkan multiplier effect bagi masyarakat Kota Jembrana melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di kota Jembrana sendiri. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di area PPN Pengembangan Jembrana maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja.
8. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan control) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para Nelayan/Stakeholder yang ada di Kota Jembrana untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhan Usahanya di Bidang Perikanan dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga Sumberdaya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ ketidakseimbangan Ekosistem Darat dan laut.

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat



Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain:

1. *Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan*

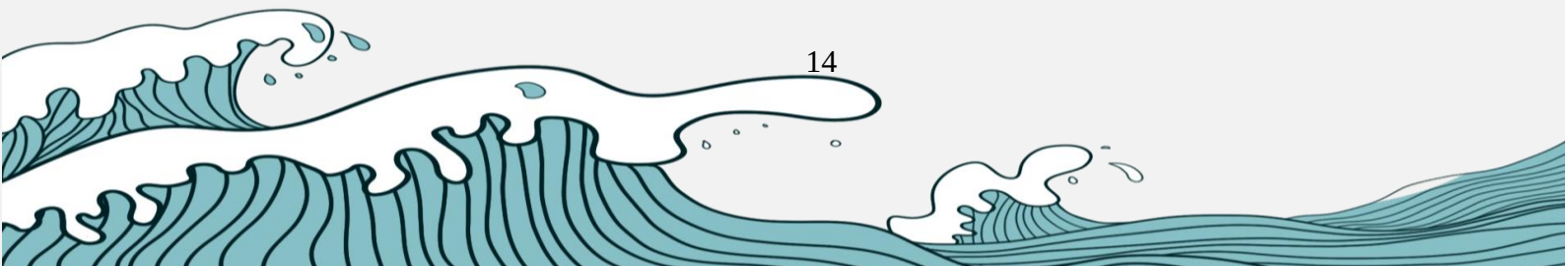
- a) Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)
- Jumlah pemenuhan pelaporan PNBP di UPT PPN Pengembangan (dokumen).

2. *Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan*

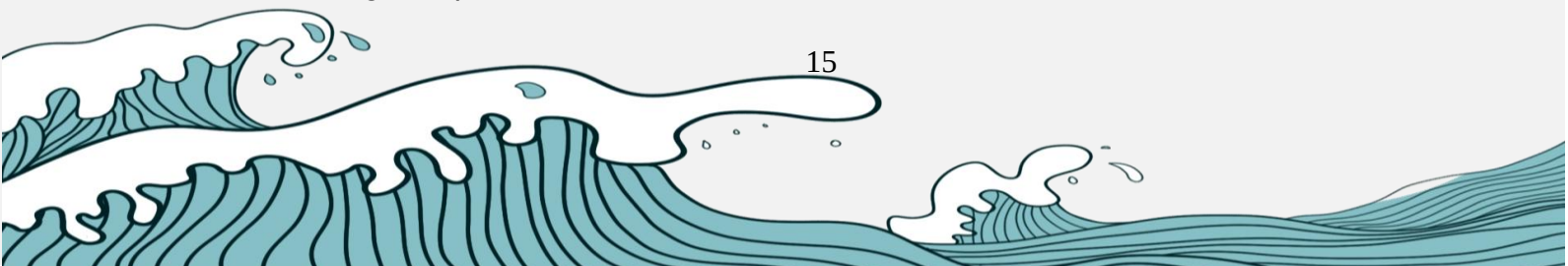
- a) Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
- Validasi nilai perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (dokumen)

3. *Pengelolaan PPN Pengembangan yang optimal dan bertanggung jawab*

- a) Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
- Jumlah permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (dokumen)
- b) Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
- Nilai Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Evkin (Aplikasi)
- c) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
- Jumlah pelayanan kesyahbandaran yang diterbitkan PPN Pengembangan (dokumen)
- d) Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
- Penjumlahan pengembangan fasilitas di PPN Pengembangan
- e) Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
- Nilai pengendalian lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Selaraskan (Aplikasi)



4. *Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan*
 - a) Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
 - Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan oleh PPN Pengembangan
 - b) Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
 - Pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri KKP Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024
5. *Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan*
 - a) Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - Nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja.
 - b) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Pengembangan (Persen)
 - Nilai persentase atas penyelesaian laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK PPN Pengembangan
 - c) Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - Aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP
 - Perencanaan kinerja 30%
 - Pengukuran kinerja 30%
 - Pelaporan kinerja 15%
 - Evaluasi kinerja
 - d) IP ASN PPN Pengembangan (indeks)
 - IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
 - e) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - (Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP / Pagu Pengadaan Barang/Jasa) x 100%



- f) Persentase Pengelolaan BMN PPN Pengembangan (Persen)
 - Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup DJPT yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Nilai IKPA PPN Pengembangan (Nilai)
 - Realisasi Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
- h) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Pengembangan (Nilai)
 - Realisasi perencanaan anggaran UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (%)
- i) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
 - Nilai survei dari masyarakat melalui Si Susan KKP (Aplikasi)

Informasi *cascading* Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Tabel Informasi Cascading / Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II)

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Frekuensi	Perhitungan	Satuan	Target
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Juta	780,487
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Ton	19.395
3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	100
		4	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Rata-rata	Nilai	85
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	10,31
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Rata-rata	Nilai	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kapal	1.480
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Semester	Rata-rata	Nilai	0,26
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	75,5

di Lingkungan PPN Pengembangan	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Persen	85
	12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	88
	13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Indeks	87
	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Persen	76
	15	Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	81
	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Nilai	92
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	71,5
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	88,5

B. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan indikator kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang di-*cascading* dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai berikut :

Tabel 5. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	CAPAIAN 2025
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)	780,487	839,48
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	19.395	19.396,60

3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	100	100
		4	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	85	99,50
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	85	97,26
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	10,31	11,28
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	30,10	91,80
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1.480	1.811
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	0,71
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	75,5	96,10
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	85	100
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	88	88,70
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	87	90,45
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	76	100
		15	Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	81	100
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	92	99,98
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	71,5	91,41
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	88,5	92,58

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan untuk Tahun 2025 dapat di komposisikan pada tabel di bawah ini

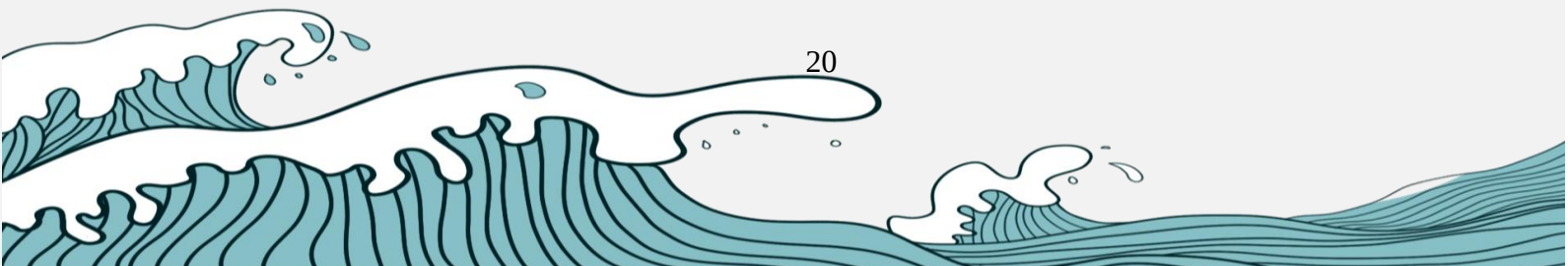
Tabel 6. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TW1 s/d TW 4 TAHUN 2025		REALISASI TW 4 TAHUN 2025		
			TARGET	% PAGU	REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	245.624.194.000	245.624.194.000	100,00%	551.739.526	0,22%	0,22%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	245.622.612.000	245.622.612.000	100,00%	550.186.526	0,22%	0,22%
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	3.680.000	3.680.000	100,00%	3.680.000	100,00%	100,00%
2338.ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	3.680.000	3.680.000	100,00%	3.680.000	100,00%	100,00%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	450.682.000	450.682.000	100,00%	214.237.047	47,54%	47,54%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	450.682.000	450.682.000	100,00%	214.237.047	47,54%	47,54%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	245.168.250.000	245.168.250.000	100,00%	332.269.479	0,14%	0,14%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	245.168.250.000	245.168.250.000	100,00%	332.269.479	0,14%	0,14%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1.582.000	1.582.000	100,00%	1.553.000	98,17%	98,17%
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	1.582.000	1.582.000	100,00%	1.553.000	98,17%	98,17%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	1.582.000	1.582.000	100,00%	1.553.000	98,17%	98,17%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.049.989.000	12.049.989.000	100,00%	11.991.833.766	99,52%	99,52%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.049.989.000	12.049.989.000	100,00%	11.991.833.766	99,52%	99,52%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	94.680.000	94.680.000	100,00%	94.679.670	0,00%	100,00%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	94.680.000	94.680.000	100,00%	94.679.670	0,00%	100,00%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	11.929.858.000	11.929.858.000	100,00%	11.871.896.321	99,51%	99,51%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	831.000	831.000	100,00%	657.881	0,00%	79,17%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.800.000	1.800.000	100,00%	1.800.000	0,00%	100,00%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.927.227.000	11.927.227.000	100,00%	11.869.438.440	99,52%	99,52%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]						
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal						
2342.EBB.971	Layanan Prasarana Internal						
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	2.599.000	2.599.000	100,00%	2.493.000	0,00%	95,92%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	2.599.000	2.599.000	100,00%	2.493.000	0,00%	95,92%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	22.852.000	22.852.000	100,00%	22.764.775	99,62%	99,62%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran						

2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.280.000	4.280.000	100,00%	4.275.575	99,90%	99,90%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	18.572.000	18.572.000	100,00%	18.489.200	99,55%	99,55%

C. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU ***Perspektif Internal Process dan Learning and Growth*** yang disandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga di dapat persentase pencapaian secara berkala.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2019 telah melaksanakan penilaian indikator kinerja utama sebanyak 13 (Tiga belas) dengan mengacu pada *Balanced Scorecard* (BSC). Pada tahun 2025, terdapat 5 (lima) sasaran strategis dengan rincian 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Tambahan. Dari perhitungan angka realisasi terhadap indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) menurut *Balanced Scorecard* (BSC) sebesar **110,63%** dengan rincian pada Tabel berikut.

Tabel 7. Matriks Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Target s/d DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%
S.01	Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan						107,56			107,56	
IKS.1	Penerimaan PNPB Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)	Juta Rupiah	Maximize	Nilai Posisi Akhir	780,49	780,49	839,48	107,56	780,49	839,48	107,56
S.02	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat						100,01			100,01	
IKS.02.1	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	19.395,00	19.395,00	19.396,60	100,01	19.395,00	19.396,60	100,01
S.03	Pengelolaan PPN Pengembangan yang optimal dan bertanggung jawab						112,29			112,36	
IKS.03.1	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100	100	100	100
IKS.03.2	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	85	85	99,5	117,06	170	198,58	116,81
IKS.03.3	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	85	97,26	114,42	85	97,26	114,42
IKS.03.4	Persentase Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10,31	10,31	11,28	109,41	10,31	11,28	109,41
IKS.03.5	Nilai Pengelolaan Linokungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	30,1	30,1	91,8	120	60,2	182,35	120
S.04	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan						120			120	
IKS.04.1	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1.480,00	1.480,00	1.811,00	120	1.480,00	1.811,00	120
IKS.04.2	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0,26	0,26	0,71	120	0,26	0,71	120
S.05	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan						113,22			113,22	
IKS.05.1	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,5	75,5	96,1	120	75,5	96,1	120
IKS.05.2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	85	100	117,65	85	100	117,65
IKS.05.3	Nilai PM SAKIP PPN Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88	88	88,7	100,8	88	88,7	100,8
IKS.05.4	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87	87	90,45	103,97	87	90,45	103,97
IKS.05.5	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76	76	100	120	76	100	120
IKS.05.6	Persentase Pengelolaan BMN di PPN Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	81	100	120	81	100	120
IKS.05.7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	99,98	108,67	92	99,98	108,67
IKS.05.8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,5	71,5	91,41	120	71,5	91,41	120
IKS.05.9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,5	88,5	92,58	104,61	88,5	92,58	104,61

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 diukur melalui 18 indikator kinerja. Adapun pembahasan masing-masing indikator kinerja akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan

IKU 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)

Indikator Nilai PNBP PPN Pengembangan adalah seluruh penerimaan PPN Pengembangan yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan PPN Pengembangan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Pengembangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Pengembangan terdiri atas penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan umum berasal dari Pendapatan dari lelang Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu. Sedangkan penerimaan fungsional merupakan pendapatan yang diperoleh Pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang ada di PPN Pengembangan. Kegiatan pelayanan jasa di PPN Pengembangan adalah sebagai berikut:

- Pelayanan Jasa Tambat Labuh;
- Pelayanan Jasa Air;
- Pelayanan Jasa *Cold Room dan Freezer*;
- Pelayanan Jasa Kendaraan (Truk Refrigerator, Dump Truk dll);
- Pelayanan Jasa Penggunaan Tanah dan/atau bangunan;



- Pelayanan Jasa Penumpukan Barang/Penjemuran jaring/ikan;
- Pelayanan Jasa Pas Masuk;
- Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan;
- Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana;
- Pelayanan Jasa Listrik;

Target indikator ini diukur dengan metode pengukuran triwulanan.

Tabel 8. Rincian Capaian Indikator

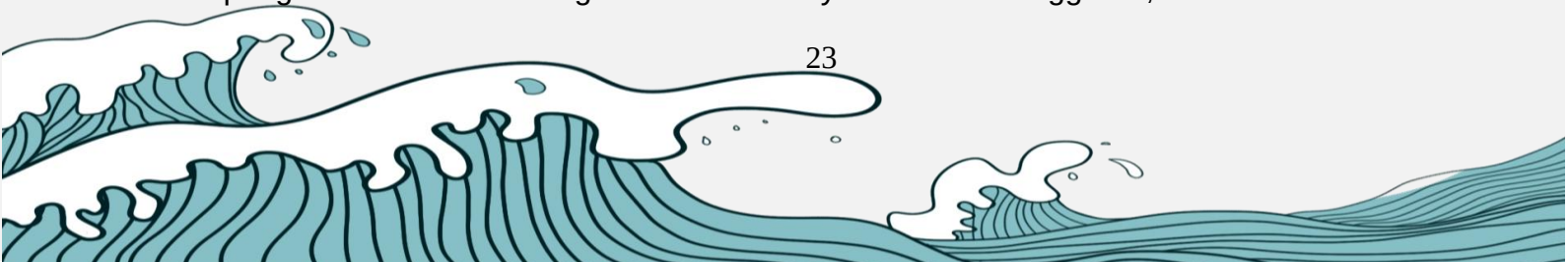
Sasaran Kegiatan – 1		Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 1		Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
760,97	1166,84	780,487	839,48	71,94	107,55

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Tahun 2025 yaitu 780,487 juta rupiah sedangkan realisasi sebesar 839,48 juta rupiah atau mencapai 107,55%. Capaian Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berasal dari Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan SKPT PP Teluk Awang (Pelabuhan Binaan PPN Pengembangan).

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 71,94%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran, dimana sebelumnya capaian PNBPN paling besar dari pengelolaan Cold storage namun adanya efisiensi anggaran, maka tidak ada



pengoperasian cold storage karena penghematan penggunaan Listrik, sehingga penerimaan dari cold storage berkurang dan bahkan tidak ada penerimaan PNBPN setelah bulan Januari 2025.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	839,48	780,487	107,55

Berdasarkan data tersebut, indikator Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 107,55%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 10. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
839,48	2277,59	36,85

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 36,85%. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penerimaan dan kondisi kepatuhan masyarakat, dimana di PPN Pengembangan masih banyak kehilangan penerimaan pada pelayanan jasa pas masuk karena masih banyak pintu masuk dan belum menggunakan palang pintu otomatis sehingga mereka dapat leluasa keluar masuk Pelabuhan. Selain itu adanya efisiensi anggaran, cold storage tidak beroperasi karena penghematan penggunaan Listrik sehingga tidak ada lagi penerimaan PNBPN dari pengoperasian cold storage setelah bulan Januari 2025. Pada tahun sebelumnya penerimaan PNBPN Non SDA tertinggi dari penerimaan pengoperasian cold storage.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Jika dilihat dari penerimaan yang ada, pada tahun 2025 penerimaan di PPN Pengembangan lebih tinggi daripada PP. Teluk Awang, hal ini dikarenakan di PP Teluk Awang, kapal-kapal yang mendaratkan ikan di PP Teluk Awang banyak yang berpindah ke PP. Tanjung Wangi sehingga penerimaan PNBP berkurang dari penerimaan tambat labuh, pas masuk maupun penggunaan tanah. Penerimaan cold storage pada tahun 2025 cenderung mengalami penurunan karena tidak adanya ketersediaan anggaran untuk pembayaran listrik jika cold storage dijalankan. Penerimaan cold storage ini merupakan sumber penerimaan terbesar sehingga jika tidak ada penerimaan dari cold storage akan sangat berdampak terhadap penerimaan PNBP PPN Pengembangan. Sedangkan pada penerimaan Pas masuk sudah meningkat dari tahun sebelumnya meskipun tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan belum adanya pagar kawasan pelabuhan sehingga akses masuk menuju pelabuhan tidak satu pintu/terdapat jalan tikus sehingga banyak yang lolos dari jasa Pas masuk. Kurangnya jumlah petugas pas masuk juga berpengaruh pada penerimaan Pas masuk. Dengan adanya pagar kawasan pelabuhan diharapkan dapat menjadi solusi dari keamanan dan peningkatan penerimaan PNBP di PPN Pengembangan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 11. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	107,56%	14.300.000	11.398.200	15.380.863	3.982.663	28%	120%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 11.398.200,-. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 28%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Penerimaan PNBP Non



SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari Pelayanan jasa Tambat labuh, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan jasa Pengadaan Air, Pelayanan Listrik, Pelayanan Pas Masuk, Pelayanan Penggunaan Tanah dan bangunan, Pelayanan jasa penggunaan kendaraan/dump truck, Pelayanan Jasa Penggunaan *Cold Storage* di PPN Pengembangan.

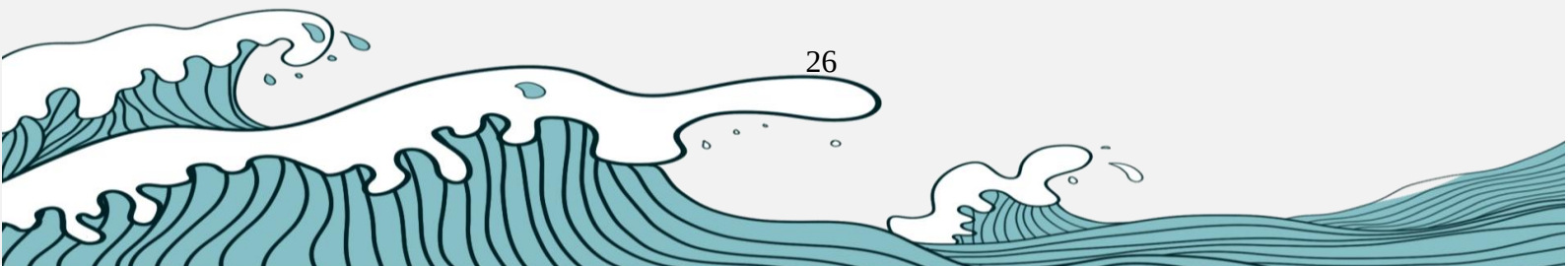
Pendapatan PNBP ini dapat dilakukan dengan maksimal jika penjagaan di pintu masuk dapat dilakukan dengan baik, dengan didirikan pagar Kawasan. Namun jika tidak terdapat pagar Kawasan pengunjung dapat lewat melalui pintu masuk lainnya. Selain itu adanya efisiensi anggaran sangat berpengaruh pada penerimaan PNBP Non SDA di PPN Pengembangan, karena dengan adanya efisiensi anggaran, pengoperasian cold storage menjadi dihentikan dalam rangka penghematan anggaran listrik yang berakibat tidak adanya penerimaan dari pengoperasian cold storage.

Sasaran Strategis 2

Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan

IKU 2 – Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)

Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan hasil dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan. Realisasi produksi perikanan tangkap PPN Pengembangan dilaporkan secara berkala setiap triwulan.



Tabel 12. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 2		Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 2		Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
14.479	23.493	19.395	19.396,60	82,56	100

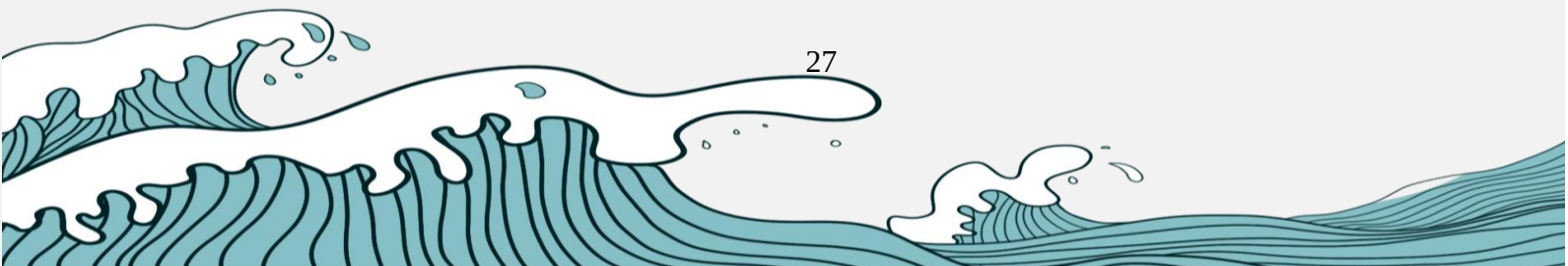
a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Secara umum hasil perikanan tangkap di PPN Pengembangan diperoleh dari usaha penangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring dan dari tali temali seperti pancing. Hasil dari usaha tangkapan ikan tersebut dikonsumsi sendiri oleh nelayan atau rumah tangga perikanan dan juga didistribusikan baik di dalam provinsi Bali maupun luar Bali .

Perkembangan produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan pada tahun 2025 yaitu mencapai 19.396,60 ton dari target yang telah ditentukan sebesar 19.395 ton. Hasil produksi perikanan tersebut mencapai target sebesar 100%. Jumlah realisasi dapat melebihi target karena didukung dengan cuaca yang baik sehingga menyebabkan kapal perikanan dapat melakukan usaha penangkapan lebih optimal dan hasil produksi meningkat.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

Berdasarkan data di atas, capaian Tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 82,56%. Tahun 2025 sebesar 19.396,60 ton sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar 23.493 ton. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan produksi pada tahun 2025 yaitu cuaca yang kurang baik di perairan selat bali sehingga mengurangi jumlah hasil tangkapan ikan dominan yang di tangkap oleh kapal pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal yang di daratkan di PPN Pengembangan.



c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan	19.396,60	19.395	100

Berdasarkan data tersebut, indikator Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 107,55%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

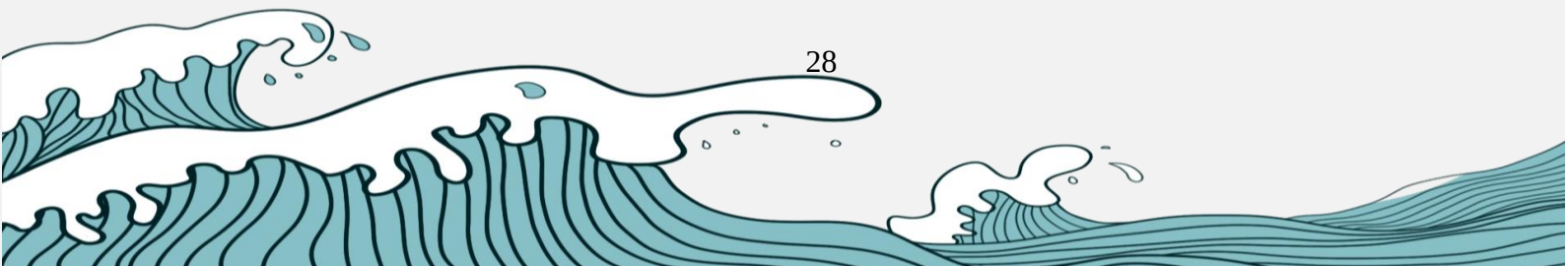
Tabel 14. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
19.396,60	11.898,55	163,01

Jika dibandingkan dengan capaian di PPN Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan 163,01%. Faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan yaitu cuaca dan musim ikan serta perbedaan jumlah armada kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan maupun kegagalan jumlah produksi untuk mencapai target yang telah ditentukan tidak terlepas dari beberapa faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, contohnya seperti cuaca maupun iklim yang dapat berpengaruh nyata terhadap hasil tangkapan nelayan. Apabila keadaan cuaca kurang baik maka hasil produksi akan menurun karena para nelayan tidak dapat menangkap ikan. Selain itu kuantitas hasil tangkapan juga dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan nelayan. Semakin canggih peralatan navigasi yang digunakan maka nelayan mampu menjangkau gerombolan ikan, contohnya seperti penggunaan fish finder. Daya mesin kapal juga berpengaruh terhadap seberapa jauh kapal tersebut dapat melakukan trip.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 15. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan	100,01%	17.653.000	7.253.000	17.654.456	10.401.456	59%	197%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan sebesar Rp 7.253.000 Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 59%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan adalah tim kerja Operasional Pelabuhan dan Operator PIPP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh PPN Pengembangan khususnya Tim Kerja Operasional dalam mendukung tercapainya target produksi perikanan tangkap, yaitu rutin melakukan enumerasi produksi perikanan tangkap pada hari kerja maupun hari libur, sinkronisasi data kapal bongkar dengan Kesyahbandaran dan TKPU, dan sinkronisasi data perikanan tangkap dengan TPI dan Dinas Perikanan Kabupaten Jembrana.

Sasaran Strategis 3

Pengelolaan PPN Pengembangan yang Optimal dan Bertanggung Jawab

IKU 03 - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)

Indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2024. Permohonan perusahaan dilakukan oleh pelaku usaha pada saat melakukan penggunaan tanah dan atau bangunan baik untuk permohonan baru maupun



perpanjangan. Target indikator ini pada tahun 2025 sebesar 100 persen dengan periode pengukuran tahunan.

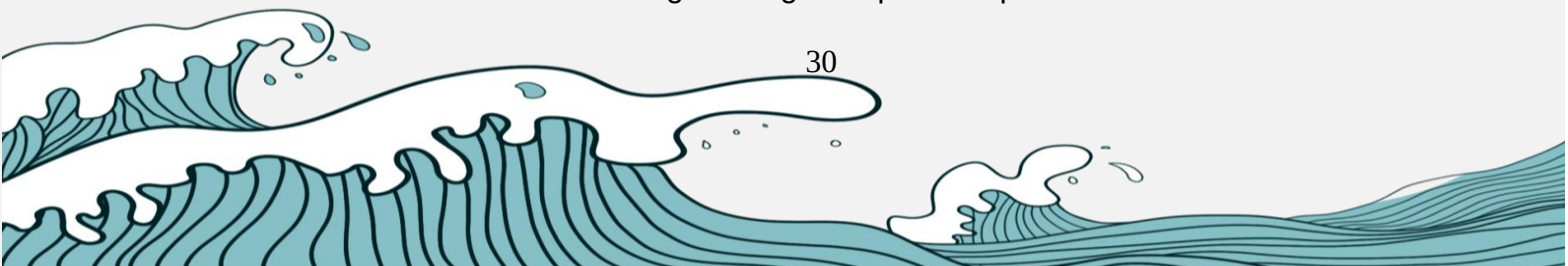
Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan perikanan merupakan salah satu tugas dan fungsi Pelabuhan sesuai dengan Permen kelautan dan perikanan nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Pada indikator kinerja ini kegiatan yang dilakukan terkait kegiatan Evaluasi Pengusahaan, Rapat stake holder dan kegiatan lain yang menunjang pengusahaan. Pada kegiatan ini tentunya tidak hanya keberhasilan dalam pencapaian realisasi anggaran saja yang dicapai namun output dari kegiatannya juga perlu diperhatikan. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaku usaha lebih memahami aturan yang telah ditetapkan terkait pengusahaan sehingga pelaku usaha lebih tertib dalam berinvestasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan dapat berpengaruh pada peningkatan PNBPN.

Tabel 16. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Optimal dan Bertanggung Jawab			
Indikator Kinerja – 3		Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
100	100	100	100	100	100

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan memiliki realisasi sama dari target yang telah ditentukan. Target dan realisasi tahun 2025 yaitu 100 persen. Pada tahun 2025 terdapat 55 permohonan dimana semua permohonan dianalisis, ditelaah untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan dapat tercapai 100% dikarenakan semua



permohonan yang masuk telah diverifikasi dan dianalisis maupun ditelaah sehingga dapat dinilai bahwa permohonan tersebut layak atau tidak.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini memiliki realisasi yang sama dengan Tahun 2024 yaitu 100 persen.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi	100	100	100

Berdasarkan data tersebut, indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen) Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 100%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 18. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
100	100	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 100%. Hal ini disebabkan untuk permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan telah memiliki standar persyaratan yang wajib dipenuhi pengguna jasa dan adanya evaluasi serta analisis yang sesuai dengan format yang ada.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) dapat meningkatkan dan memberikan kemudahan pelayanan perusahaan sehingga tercapainya indikator permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

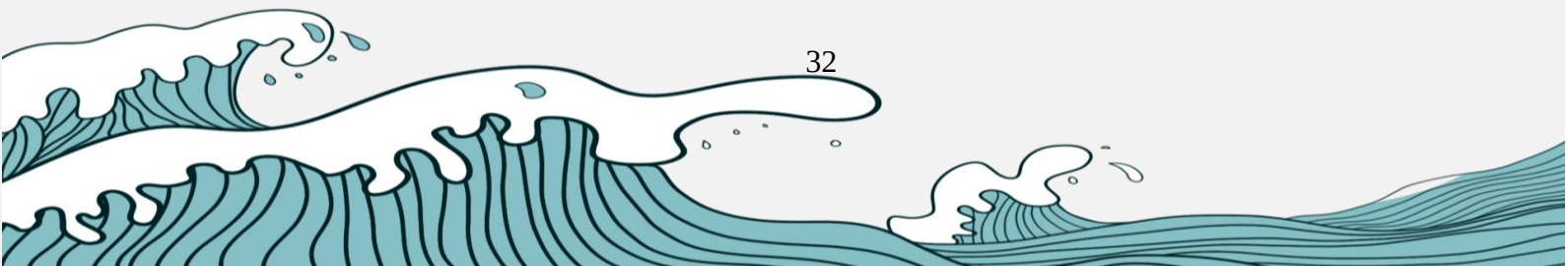
Tabel 19. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi	100%	30.860.000	18.860.000	30.860.000	12.000.000	39%	147%

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan sebesar Rp 18.860.000,. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 39%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian adalah tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan perusahaan di Pelabuhan perikanan merupakan salah satu tugas dan fungsi Pelabuhan sesuai dengan Permen kelautan dan perikanan nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Kegiatan ini masuk dalam Program dan Anggaran PPN Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp. 73.371.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.218.200,- atau capaian sebesar 98,43%. Pada indikator kinerja ini kegiatan yang dilakukan terkait pelayanan pengusaha dan kegiatan Evaluasi Perusahaan. Pada kegiatan ini tentunya tidak hanya keberhasilan dalam pencapaian realisasi anggaran saja yang dicapai namun output dari kegiatannya juga perlu diperhatikan. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaku usaha lebih memahami aturan yang telah ditetapkan terkait perusahaan sehingga pelaku usaha lebih tertib dalam berinvestasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan dapat berpengaruh pada peningkatan PNBP.



IKU 04 - Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)

Indikator ini merupakan nilai tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Penilaian indikator kinerja pelabuhan perikanan sesuai standar yang telah ditetapkan adalah dengan mengumpulkan laporan operasional untuk dievaluasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui SK. No 20/KEP/DJPT/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan. Dengan adanya indeks/nilai operasional pelabuhan perikanan maka dapat menjadi acuan sebagai indikator dalam mengukur perkembangan kinerja operasional.

Tabel 20. Rincian Capaian Indikator

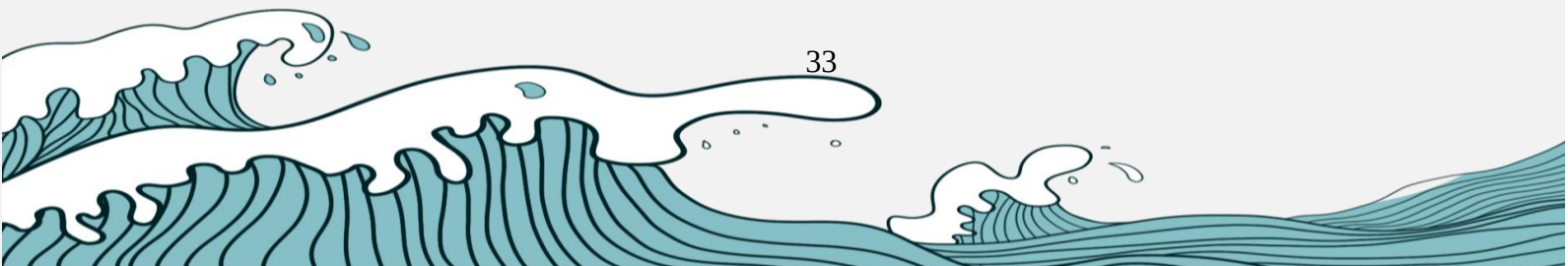
Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Optimal dan Bertanggung Jawab			
Indikator Kinerja – 4		Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
84	99,33	85	99,50	100,17	117,05

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Tahun 2025 sebesar 85 sedangkan realisasi sebesar 99,50 atau sebesar 117,05%.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 100,17%. Capaian Tahun 2025 sebesar 99,5 sedangkan Tahun 2024 sebesar 99,33. Beberapa hal yang mempengaruhi Tahun 2025 lebih tinggi yaitu terdapat parameter pelayanan umum yang mendapatkan nilai maksimal pada setiap kategorinya,



c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Tingkat Kinerja PPN Pengembangan	99,50	85	117,05

Berdasarkan data tersebut, indikator Tingkat Kinerja PPN Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 117,05%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 22. Perbandingan dengan Satker Lain

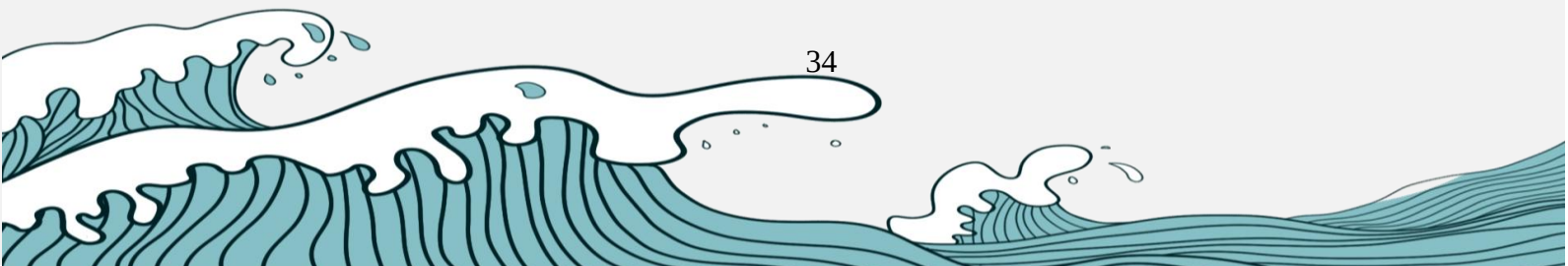
Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
99,50	98,67	100,84

Jika dibandingkan dengan capaian di PPN Prigi, capaian di PPN Pengembangan mencapai 100,84%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar parameter penilaian di PPN Pengembangan telah terlaksana dengan baik sehingga mendapatkan nilai maksimal.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan nilai realisasi Tingkat Kinerja Operasional Pelabuhan pada Tahun 2025 yaitu 99,5 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan pada PPN Pengembangan berjalan efektif dan optimal menunjang pengembangan pelabuhan perikanan yang lebih baik. Evaluasi kinerja operasional ini sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran kinerja suatu pelabuhan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat dan daerah.

Terdapat berbagai macam parameter penilaian, namun dalam penilaian ini menitik beratkan pada pelayanan umum dan kinerja suatu pelabuhan pada masing-masing tim kerja yang ada di pelabuhan.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 23. Realisasi anggaran untuk mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Tingkat Kinerja PPN Pengembangan	117,06%	99.457.000	65.740.607	116.423.194	50.682.587	51%	177%

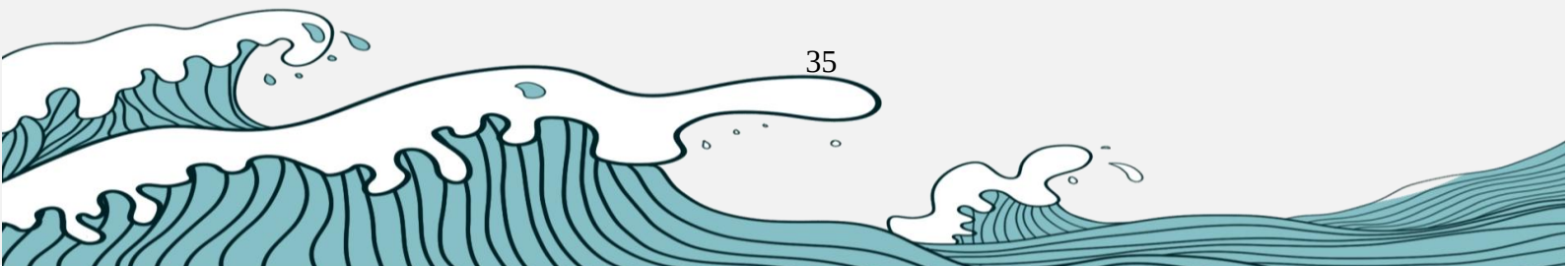
Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 65.740.607. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 51%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Kinerja PPN Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim kerja dan operator PIPP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang kinerja

Evaluasi kinerja (evkin) operasional pelabuhan dilakukan pada aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). SDM dari kegiatan ini adalah petugas pelayanan ataupun petugas yang telah ditunjuk untuk melakukan pengumpulan data. Data yang telah didapatkan pada masing-masing tim kerja kemudian direkapitulasi untuk menjadi data harian dan bulanan yang akan dianalisa. Ruang lingkup antara lain fasilitas pelabuhan, administrasi dan sistem informasi pelayanan umum dan pelayanan penarikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), pelayanan tambat labuh, kegiatan realisasi anggaran, investasi dan industri yang ada di dalam pelabuhan serta kegiatan monitoring K5. Keberhasilan dari nilai evkin yang mencapai target merupakan usaha yang telah dilakukan oleh seluruh SDM pada masing-masing timkerja di PPN Pengembangan secara optimal.

IKU 05 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam hal ini Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran adalah kegiatan pelayanan publik atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesyahbandaran seperti Permohonan Persetujuan Berlayar, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal dll terkait operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan yang diajukan oleh pengguna jasa di pelabuhan.

Tabel 24. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Optimal dan Bertanggung Jawab			
Indikator Kinerja – 5		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
84	100	85	97,26	97,26	114,42

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2025 sebesar 85 persen dan realisasi sebesar 97,26 persen. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dapat tercapai karena faktor antara lain :

1. PPN Pengembangan telah mencanangkan program yaitu Wilayah Bebas korupsi (WBK) dimana didalamnya ada poin poin dalam peningkatan kualitas pelayanan public sehingga ada peningkatan dari segi petugas pelayanan, fasilitas dll sehingga dapat menunjang pelayanan public yang baik
2. Keterbukaan informasi pelayanan yang mudah diakses sehingga persyaratan aturan dll dapat dipahami oleh pengguna jasa sehingga berkas permohonan yang



masuk adalah permohonan yang sudah sesuai dengan persyaratan sehingga langsung dapat dilayani dengan baik

3. Sosialisasi yang cukup efektif dengan pengguna jasa terkait aturan aturan baru dan komunikasi yang baik sehingga dapat menunjang kinerja pelayanan public di PPN Pengembangan

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini memiliki realisasi yang lebih rendah dari Tahun 2024 sebesar 97,26%. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kapal yang belum memiliki dokumen lengkap sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar dan STBLK Kedatangan, sehingga terjadinya penurunan pelayanan.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	97,26	85	114,42

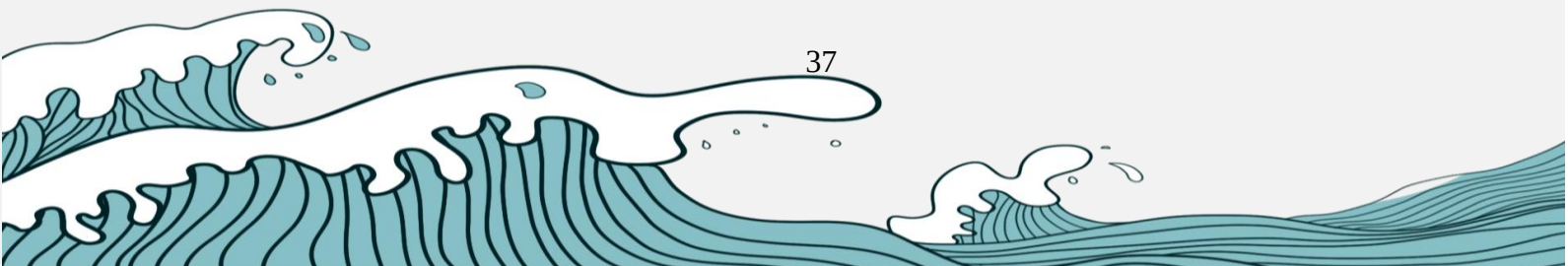
Berdasarkan data tersebut, indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 114,42%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 26. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
97,26	41,74	233%

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 233%.



e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Setiap unit kerja pemerintah dituntut untuk menjalankan program berdasarkan IKU yang telah ditetapkan serta menata manajemennya dengan baik. Tujuan dasar adalah bagaimana dalam hal ini IKU terkait tingkat pelayanan kesyahbandaran dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan suatu unit kerja dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berkomunikasi dengan pengguna jasa dalam rangka menginformasikan aturan aturan yang telah dibuat . dalam hal ini komunikasi menjadi sangat penting dalam menjalankan program program antara pemerintah dengan pelaku usaha yang dibatasi dengan koridor koridor aturan sehingga hal itu yang kadang menjadi kendala sehingga pelayanan terkesan menyulitkan aturan yang tumpang tindih dll. Sehingga komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalankan program pemerintah. Sehingga dalam meningkatkan pelayanan kesyahbandaran perlu adanya komunikasi antar pengguna jasa dan unit pelayanan public yaitu PPN Pengembangan

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 27. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Pengembangan	114,42%	131.547.000	11.430.000	150.520.720	139.090.720	106%	314%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 11.430.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 106%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran adalah Tim Kerja Kesyahbandaran sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dukungan kegiatan sosialisasi sosialisasi yang cukup sehingga akan mengurangi miss informasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami satu sama lain dengan lebih baik dalam menjalankan program program yang ada. bahwa komunikasi pemerintah sangat penting dilakukan terutama dalam hal pelayanan publik. Komunikasi pemerintah menjadi titik utama dalam suksesnya keberlangsungan pelayanan publik guna mewujudkan good governance sebab pemerintah berperan sebagai komunikator yang menyalurkan berbagai info pada masyarakat dan mempersuasi masyarakat agar turut aktif dalam pengembangan sumber daya publik.

IKU-06 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Pengendalian pengembangan fasilitas merupakan indikator terkait fasilitas pada Pelabuhan yang tersedia dibandingkan fasilitas yang ada pada master plan. Dalam Masterplan PPN Pengembangan Tahun 2021 terdapat luasan lahan 103,63 ha sedangkan eksisting luasan saat ini 13,5 ha.

Tabel 28. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Optimal dan Bertanggung Jawab			
Indikator Kinerja – 6		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
10,31	11,28	10,31	11,28	100	109,40

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2025 sebesar 10,31 dan realisasi sebesar 11,28 persen. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dengan menggunakan master plan tahun 2021 masih rendah dikarenakan pengembangan Pelabuhan baru akan dimulai di tahun 2025 dan secara bertahap sampai dengan 2028. Namun dilihat dari penggunaan tanahnya saat ini masih mencapai target walaupun kecil persentasenya. Dengan adanya pengembangan PPN Pengembangan melalui anggaran PHLN dari IsDB diharapkan fasilitas yang tersedia dapat bermanfaat bagi Masyarakat.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

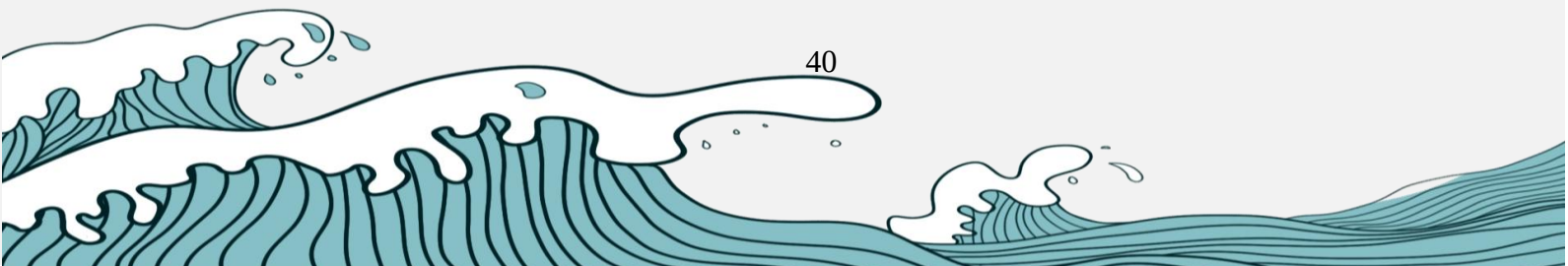
Pada tahun 2025 realisasi IKU sama dengan tahun 2024 sebesar 100%, hal ini disebabkan belum adanya pengembangan/penambahan fasilitas Pelabuhan. Pengembangan Pelabuhan baru akan dilaksanakan rencana mulai tahun 2026 melalui Proyek IFP-IFM dengan lender IsDB (Islamic Development Bank).

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	11,28	10,31	109,40

Berdasarkan data tersebut, indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 109,40%.



d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 30. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
11,28	75,53	14,9

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan hanya mencapai 14,9%. Hal ini disebabkan karena Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi lebih dulu menjadi UPT DJPT dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sejak tahun 2007 menjadi UPT DJPT sehingga fasilitas PPN Prigi lebih lengkap. Selain itu acuan perhitungan dari IKU ini menggunakan master plan tahun 2021 dimana master plan ini menjadi acuan kegiatan pembangunan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang akan dimulai pada tahun 2025.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pada IKU telah tercapai dengan persentase 109,40% namun untuk dapat mencapai realisasi standar nasional dengan diberikan anggaran untuk Pengembangan Fasilitas karena sejak tahun 2017 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tidak diberikan anggaran untuk Pengembangan Fasilitas. Dan tahun 2024 PPN Pengembangan menerima anggaran untuk pengembangan pelabuhan melalui dana PHLN dari IsDB. Kegiatan ini akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2028.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 31. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan	109,41%	245.171.930.000	335.949.479	268.238.542.231	267.902.592.752	109%	323%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 335.949.479,-. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 109%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

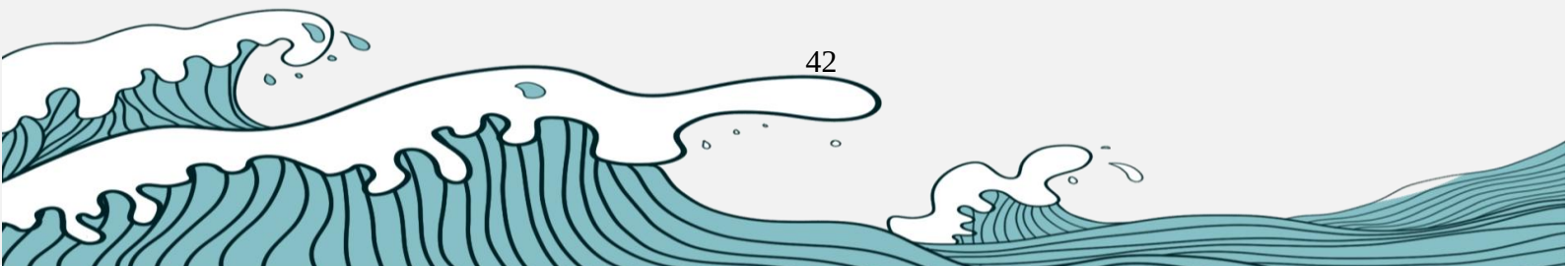
Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan serta tantangan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Pengembangan:

Faktor Keberhasilan Program

- **Capaian Melampaui Target:** Realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 11,28%, yang mana angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 10,31%. Jika dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra, capaian ini menyentuh angka 109,40%.
- **Dukungan Anggaran Internasional:** Keberhasilan pengembangan pelabuhan sangat ditunjang oleh penerimaan anggaran melalui dana PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) dari IsDB (Islamic Development Bank) yang dimulai pada tahun 2024. Proyek ini dikenal sebagai Proyek IFP-IFM yang direncanakan berjalan bertahap hingga tahun 2028.
- **Efisiensi Sumber Daya:** Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai sudah efisien, khususnya melalui peran Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha. Selain itu, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung indikator ini tercatat sebesar Rp335.949.479,- dengan nilai efisiensi mencapai 109%.

Faktor Penghambat / Tantangan

- **Kesenjangan dengan Standar Nasional:** Meskipun target internal tercapai, capaian PPN Pengembangan (11,28%) masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan satker lain seperti PPN Prigi (75,53%). Hal ini disebabkan PPN Prigi sudah lebih lama menjadi UPT DJPT (sejak 2007), sehingga fasilitasnya jauh lebih lengkap.



- Keterbatasan Anggaran Masa Lalu: Sejak tahun 2017, PPN Pengembangan tidak menerima anggaran untuk pengembangan fasilitas, sehingga realisasi pengembangan masih sangat rendah dibandingkan dengan luasan lahan pada *master plan*.
- Rasio Lahan Eksisting: Saat ini, luasan lahan eksisting baru mencapai 13,5 ha, sementara target pengembangan dalam *Masterplan* tahun 2021 adalah sebesar 103,63 ha.
- Proses Bertahap: Pengembangan pelabuhan baru benar-benar akan dimulai secara fisik pada tahun 2025/2026, sehingga persentase pengendalian fasilitas saat ini masih terlihat kecil.

IKU 07 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Pengendalian Lingkungan merupakan indikator yang memuat kegiatan yang dilakukan dalam menjaga kondisi lingkungan yang sesuai dengan standar. Kegiatan ini juga di pantau melalui aplikasi SELARASKAN (Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan).

Tabel 32. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Optimal dan Bertanggung Jawab			
Indikator Kinerja – 7		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
30,10	92,62	30,10	91,80	307,70	304,98

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Tahun 2025 yaitu 30,10 sedangkan realisasi sebesar 91,80 atau mencapai 304,98%. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dapat tercapai karena Kerjasama dari Tim Kerja sehingga kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan aplikasi pada SELARASKAN dapat dilakukan sehingga mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin.

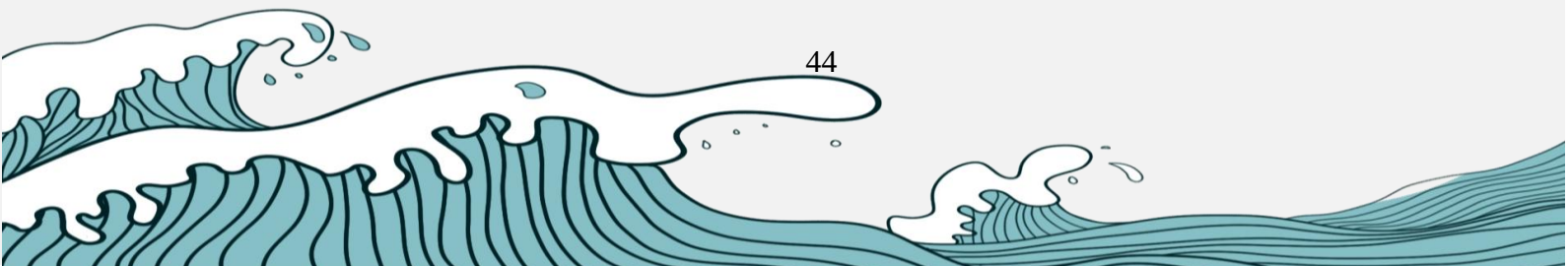
b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 307,70%. Tahun 2025 sebesar 91,80 sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar 92,62. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga evidence yang diupload dalam aplikasi oleh petugas setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai tidak maksimal karena kurangnya pemeliharaan terkait fasilitas, misalnya pada pemeliharaan jalan karena tidak adanya anggaran kita tidak bisa melakukan pemeliharaan jalan, namun di evidence kita masukkan kebersihan jalan, sehingga nilainya tidak dapat maksimal. Untuk tahun 2025 terdapat pemeliharaan kolam labuh dengan melakukan pengerukan sedimentasi pada pintu masuk kolam Pelabuhan sehingga kapal-kapal yang akan masuk pada saat surut terendah masih bisa masuk dan ikan-ikan hasil tangkapan bisa terselamatkan dari penurunan mutu. Untuk pemeliharaan yang lain misalnya pemeliharaan drainase belum bisa tertangani karena adanya efisiensi anggaran.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	91,80	30,10	304,98



Berdasarkan data tersebut, indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 304,98%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 34. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
91,80	88,64	103,56

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 103,56%. Hal ini disebabkan karena perbedaan fasilitas yang tersedia di masing-masing Pelabuhan.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

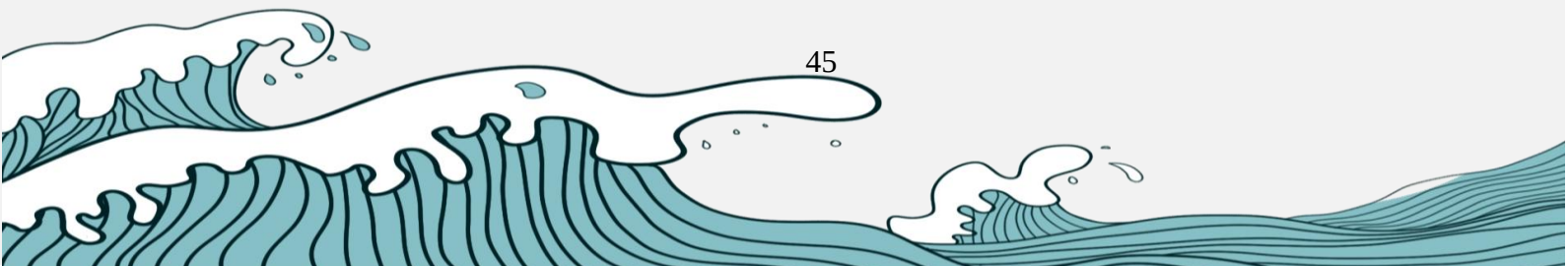
Pada IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sudah tercapai, keberhasilan ini dukungan dan komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memenuhi penilaian yang dipersyaratkan pada aplikasi SELARASKAN. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian ini perlu adanya sosialisasi pihak-pihak tertentu terkait data dukung untuk penilaian serta ketersediaan anggaran yang cukup untuk memenuhi kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan pada aplikasi SELARASKAN.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 35. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai Pengendalian Lingkungan	304,98%	118.286.000	21.169.000	360.752.651	339.583.651	287%	768%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 21.169.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran



sebesar 287%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dan Operator Selaraskan sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

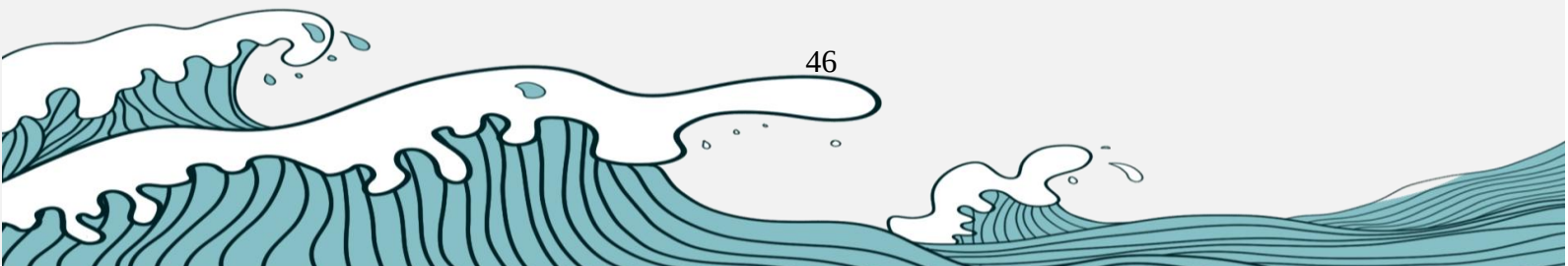
Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini yakni kegiatan terkait uji kualitas air dan udara yang dilakukan satu kali dalam setahun untuk uji melalui laboratorium karena adanya efisiensi anggaran. Dengan adanya ketersediaan anggaran untuk uji kualitas ini diharapkan nilai dari Selaraskan dapat lebih maksimal. Adapun Uji yang dilakukan melalui Laboratorium BPISDKP dan Unilab. Selain uji kualitas air dan uji kualitas udara, kegiatan lain yang menunjang seperti kegiatan kebersihan, pemeliharaan, pengolahan sampah, hemat energi juga dapat menunjang penilaian dalam selaraskan. Khususnya terkait pemeliharaan dan kegiatan yang lain juga sebaiknya tersedia anggaran yang cukup untuk kegiatan pemeliharaan maupun pengolahan sampah sehingga data dukung dapat terpenuhi. Adanya Kerjasama dalam Tim Kerja Pelabuhan sangat berpengaruh dalam pencapaian indikator tersebut.

Sasaran Strategis 4

Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan

IKU-08 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan merupakan Indikator laporan atas hasil pelaksanaan perijinan terhadap kapal perikanan yang terdaftar di PPN Pengembangan, antara lain Sertifikat Kelaiakan Kapal Perikanan (SKKP). SKKP adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan untuk keselamatan pelayaran. PPN Pengembangan sebagai UPT DJPT KKP melayani pengurusan SKPP dengan kapal yang memiliki ijin daerah dengan ukuran kapal dibawah 30 GT.



Tabel 36. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 4		Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
1043	1430	1480	1811	126,64	122,36

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

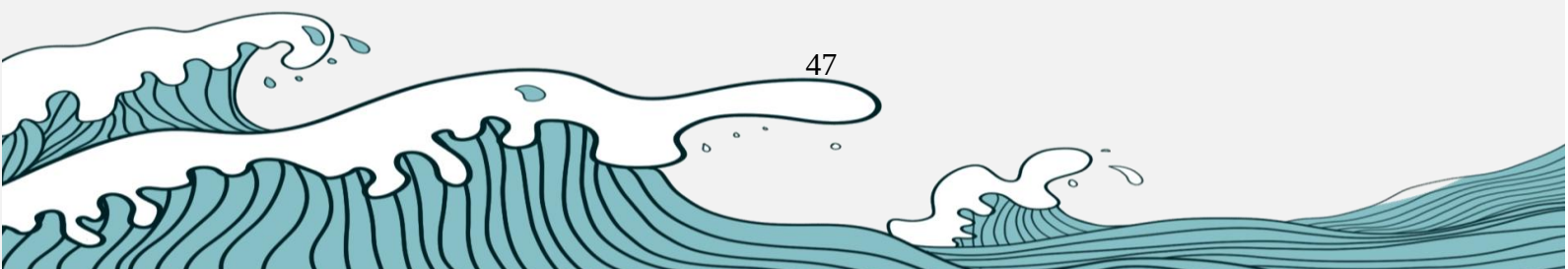
Indikator kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target Tahun 2025 yaitu 1480 kapal sedangkan realisasi sebesar 1811 kapal atau mencapai 122,36%. Hal tersebut karena permintaan untuk penerbitan SKKP terus ada pada setiap bulannya dan cenderung meningkat pada periode ini.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 126,64%. Tahun 2025 sebesar 1811 sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar 1430.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra**Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	1811	1480	122,36



Berdasarkan data tersebut, indikator Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 122,36%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

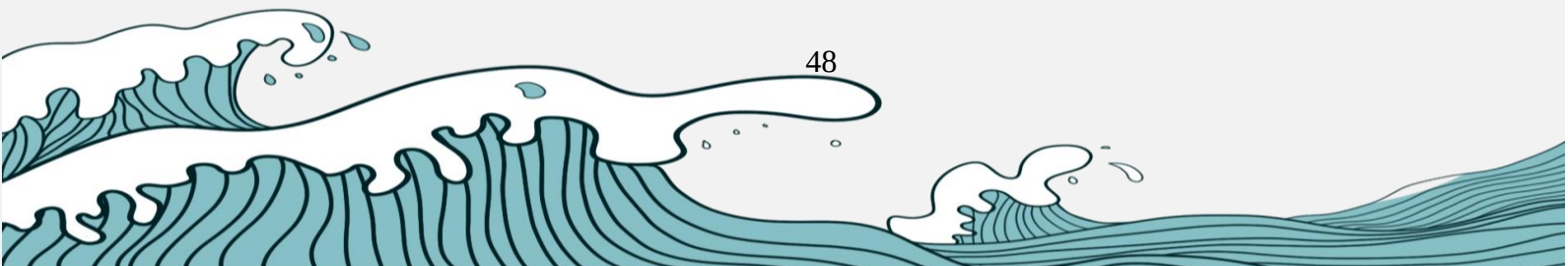
Tabel 38. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
1811	562	322

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 322%. Hal ini disebabkan karena permohonan pelayanan penerbitan SKKP di PPN Pengembangan tinggi dan mencakup wilayah provinsi Bali, NTT, dan NTB.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pada Triwulan IV Tahun 2025 penerbitan SKKP dilakukan dengan dua skema yaitu penerbitan reguler melalui pemeriksaan cek fisik kapal perikanan di lapangan dan penerbitan perpanjangan sementara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia. Dengan adanya surat edaran ini terdapat banyak kapal perikanan yang mengajukan perpanjangan dokumen tanpa cek fisik, sehingga realisasi penerbitan dapat mencapai target.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 39. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	122,36%	-	-	-	-	122%	256%

Pada Tahun 2025, untuk mendukung capaian indikator Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan, anggaran untuk pelaksanaannya semua berasal dari Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan. Dengan demikian secara anggaran di Satker PPN Pengembangan terjadi efisiensi 122%.

b. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam konteks pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, salah satu pendekatan yang diterapkan adalah pengendalian input (input control) melalui pengaturan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Upaya-upaya tersebut bermuara pada pengelolaan akses pemanfaatan sumber daya ikan melalui mekanisme pendaftaran kapal perikanan serta perizinan usaha perikanan tangkap, sehingga hanya pelaku usaha yang memenuhi ketentuan yang diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kapal perikanan yang beroperasi tidak hanya memiliki legalitas, tetapi juga laik secara operasional untuk melaut, menangkap, dan menyimpan ikan dengan standar keselamatan dan penanganan hasil tangkapan yang baik.

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang meliputi aspek laik laut, laik tangkap, dan laik simpan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan. Dengan demikian, penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan regulasi, namun juga merupakan langkah strategis dalam mendukung

praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, meningkatkan keselamatan pelayaran kapal perikanan, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam rangka pemberantasan IUU Fishing guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

IKU-09 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Pengembangan

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia. Tujuan implementasi indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Tabel 40. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 4		Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 9		Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Pengembangan (Nilai)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
-	-	0,26	0,71	-	273,06

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2025 sebesar 0,26 persen dengan realisasi sebesar 0,71 dengan persentase sebesar 273,06. Hal ini disebabkan peningkatan penerbitan Persetujuan Berlayar yang mempengaruhi nilai terhadap kelengkapan dokumen pengawakan sebagai salah satu syarat penerbitan Persetujuan Berlayar.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, Indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena merupakan Indikator Kinerja baru di PPN Pengembangan.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Pengembangan	0,71	0,26	273,06

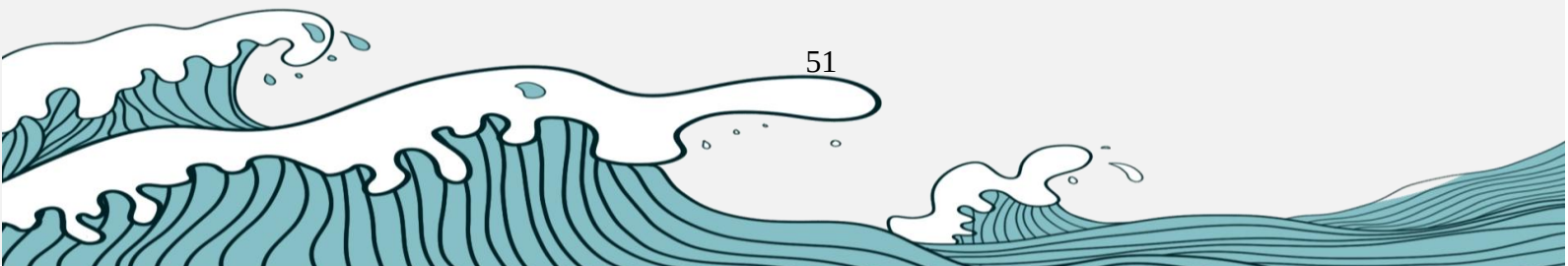
Berdasarkan data tersebut, indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 273,06%.

c. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 42. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
0,71	0,33	215

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 215 %.



d. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dalam pemenuhan awak kapal perikanan ini dipengaruhi oleh kesadaran dari pelaku usaha agar selalu mematuhi aturan yang berlaku dan komitmen dari PPN Pengembangan untuk mendukung dan mencari solusi ketika hambatan dalam pelaksanaan aturan itu terjadi seperti kerjasama dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikat pengawakan, penjaminan keselamatan kerja dan komunikasi dengan Direktorat Pengawakan di KAPI dalam pemenuhan aturan awak kapal perikanan, kegagalan yang terjadi biasanya karena memang kapal kapal masih tradisional kemudian kurangnya informasi terkait pemenuhan dokumen dan belum meratanya lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat awak kapal diseluruh Indonesia sehingga itu menjadi salah satu kendala serta pendekatan kepada pelaku usaha dalam menginformasikan aturan yang berlaku

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

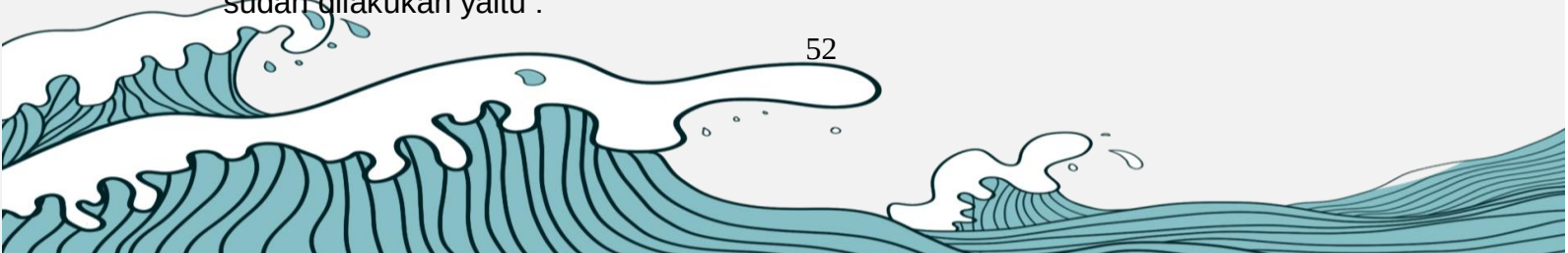
Tabel 43. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Pengembangan	273,08%	-	-	-	-	273%	733%

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Pengembangan adalah Tim Kerja Kesyahbandaran sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai keberhasilan tersebut ada beberapa langkah langkah yang sudah dilakukan yaitu :



1. Komunikasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, HNSI, Serikat pekerja (KP3I Cabang Bali), ATLI ASOSIASI TUNA LONGLINE INDONESIA terkait kebijakan pengawakan kapal perikanan
2. Menjalin komunikasi dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikat pengawakan seperti Balai Balai Pelatihan dalam rangka pemenuhan sertifikat awak kapal
3. Menggandeng BPJS Ketenagakerjaan terkait jaminan keselamatan kerja pada awak kapal perikanan
4. Komunikasi dan koordinasi dengan Direktorat Pengawakan KAPI terkait kendala kendala yang terjadi dalam pemenuhan pengawakan kapal perikanan
5. Komitmen PPN Pengembangan yaitu syahbandar dalam melaksanakan aturan tersebut kepada kapal kapal yang akan melaksnaakan clearance
6. Mendorong pelaku usaha untuk lebih aware terhadap dokumen Perjanjian Kerja Laut awak kapal perikanan

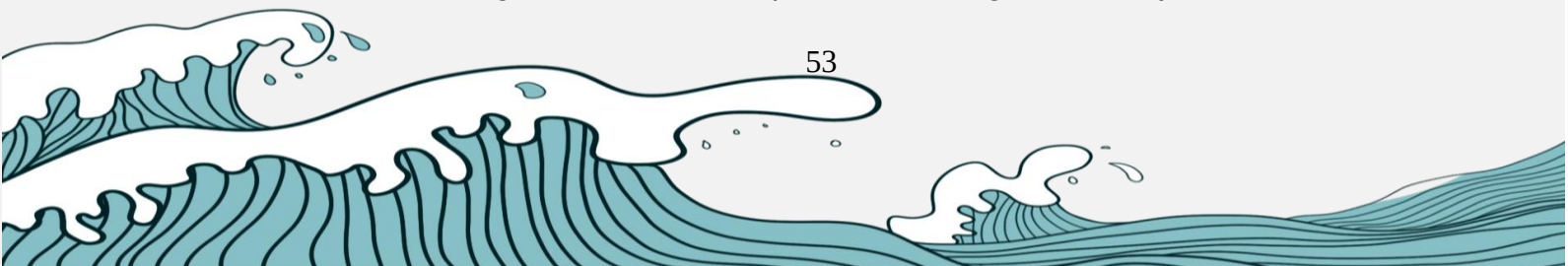
Sasaran Strategis 5

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan

IK- 10 Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator yakni (1) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (2) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (3) Nilai PM SKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (4) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “*Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Pengembangan*” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Penilai Internal (TPI)

Inspektorat Jenderal Bidang V Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di

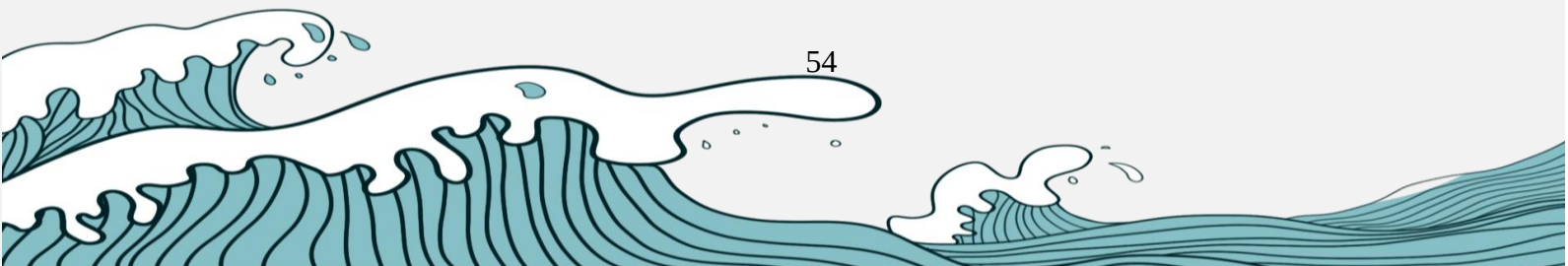


lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

- a) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akan dinilai;
- b) Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- c) Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- d) Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- e) Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- f) Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Komponen penilaian terdiri atas 2 (dua) komponen dengan beberapa area perubahan yakni sebagai berikut :

- (1) Komponen Proses/Pengungkit, mencakup 8 (delapan) area perubahan antara lain:
 - a. Manajemen Perubahan, dengan indikator penilaian: Tim Pembangunan ZI, Roadmap Pembangunan ZI, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI, Perubahan Pola Pikir dan budaya kinerja
 - b. Penataan Tata Laksana, dengan indikator penilaian : Proses bisnis dan SOP kegiatan utama, E-Government, Keterbukaan Informasi Publik
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, dengan indikator penilaian : Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem informasi Kepegawaian,



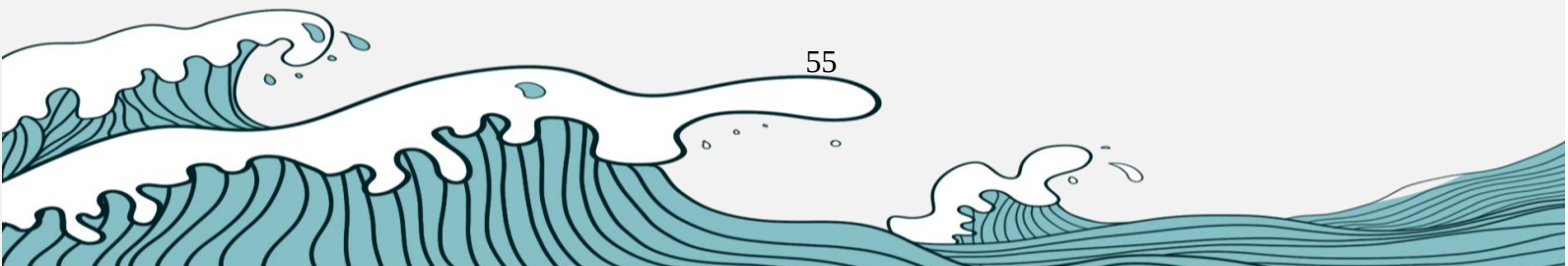
- d. Penguatan Akuntabilitas, dengan indikator penilaian : Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,
 - e. Penguatan Pengawasan, dengan indikator penilaian : Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas, APIP
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Pemanfaatan teknologi Informasi
- (2) Komponen Hasil
- a. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Korupsi dan Opini BPK,
 - b. Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

Tabel 44. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 10		Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
-	-	75,5	96,10	-	127,28

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2025 sebesar 75,5 persen dengan realisasi yaitu 96,10 atau 127,28 persen.



b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, Indikator Nilai PM Pembangunan Zona integritas tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena merupakan Indikator Kinerja baru di PPN Pengembangan.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	75,5	96,10	127,28

Berdasarkan data tersebut, indikator Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 127,28%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 46. Perbandingan dengan Satker Lain

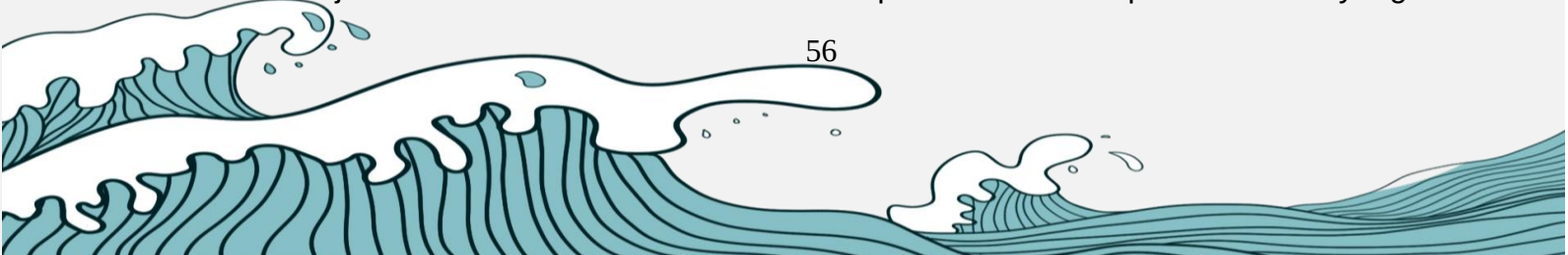
Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
96,10	81,83	117,4

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 117,4%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja ini merupakan unsur penunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang



professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Telah dilakukan pemeriksaan dokumen WBK oleh ITJEN KKP. Upaya selanjutnya adalah terus melengkapi kelengkapan dokumen dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

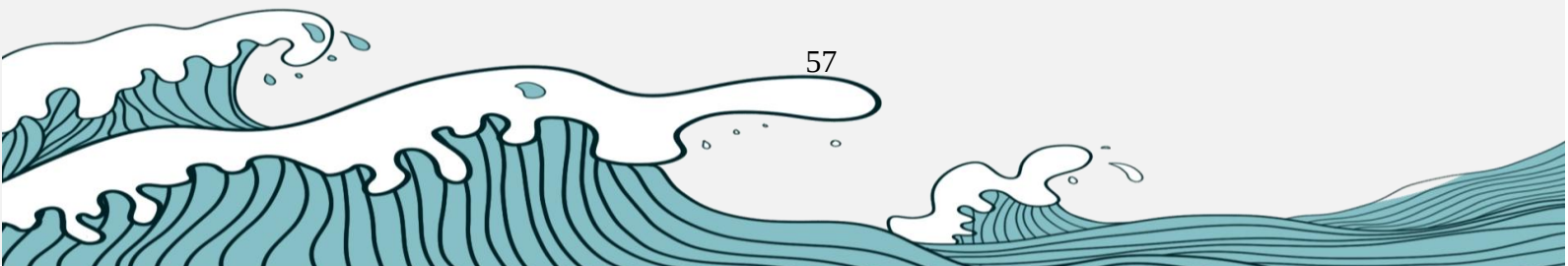
Tabel 47. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	127,28%	831.000	657.881	1.057.736	399.855	48%	170%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 657.881,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 48%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi PPN Pengembangan yang merupakan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diatur oleh Kemenpan RB dan telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP.



IKU- 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mengacu pada jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada setiap triwulan yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 48. Rincian Capaian Indikator

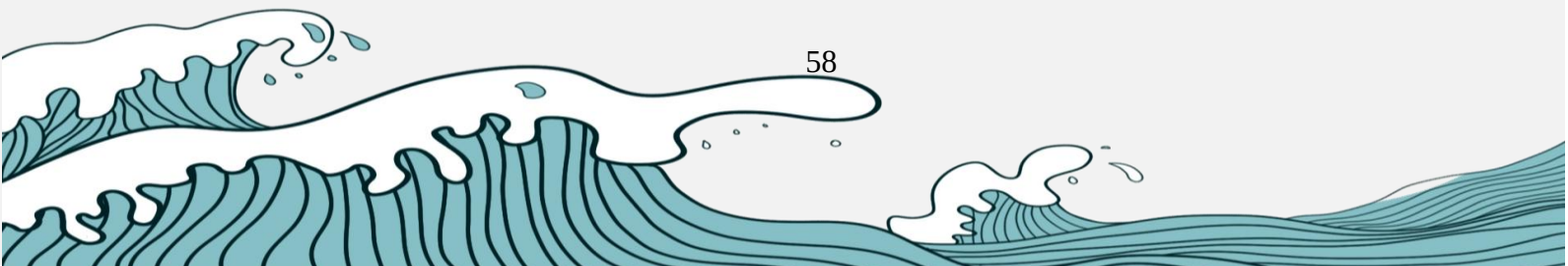
Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
80	66,67	85	100	149,9	117,64

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih rendah dari target yang telah ditentukan sebesar 117,64 persen. Target Tahun 2025 sebesar 85 persen dan realisasi yaitu 100 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi Tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yaitu mencapai 149,9%.



c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	100	85	117,64

Berdasarkan data tersebut, indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 117,64%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

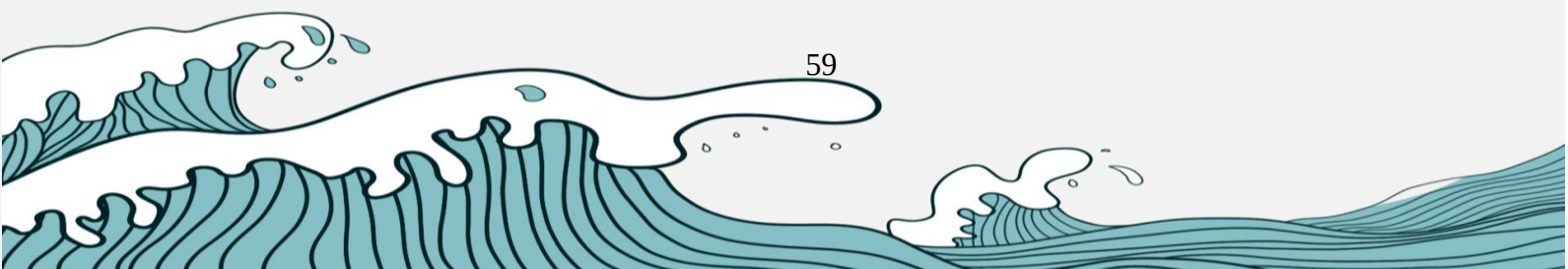
Tabel 50. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
100	100	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 100%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

IKU ini dapat dilakukan apabila satker telah tindaklanjuti temuan yang telah dilakukan oleh ITJEN KKP dan melaksanakan saran yang telah diberikan. Aplikasi yang digunakan adalah Sidak KKP. Seluruh temuan di PPN Pengembangan telah ditindaklanjuti dan tuntas.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 51. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	117,65%	2.599.000	2.493.000	3.057.647	564.647	22%	104%

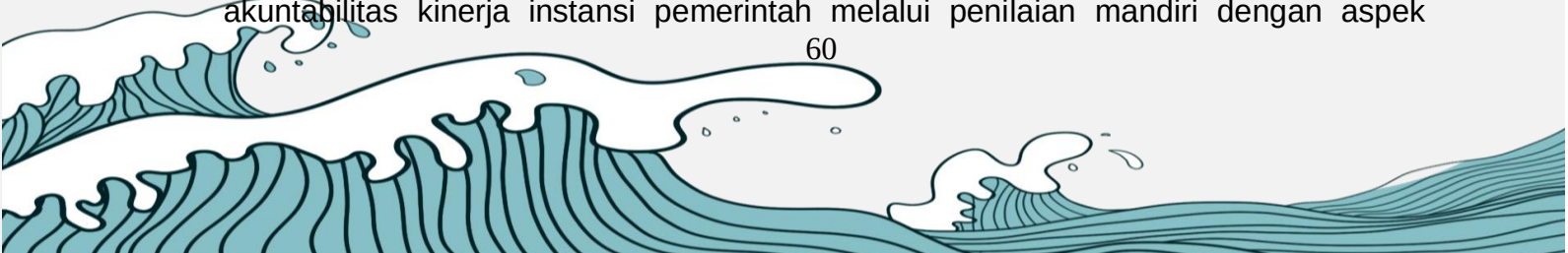
Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 2.493.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 22%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Sidak sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan ini berupa pelaksanaan pelaporan tindak lanjut terhadap temuan oleh ITJEN KKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Sebagai bentuk antisipasi untuk tunggakan tambat labuh agar tidak terulang kembali, digunakan aplikasi SIJAKA untuk pengguna jasa yang akan berangkat berlayar dan digunakan Teman SPB supaya SPB dapat diterbitkan.

IK- 12 Nilai PM SAKIP PPN Pengembangan

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek



penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP (nama satker) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP.

Tabel 52. Rincian Capaian Indikator

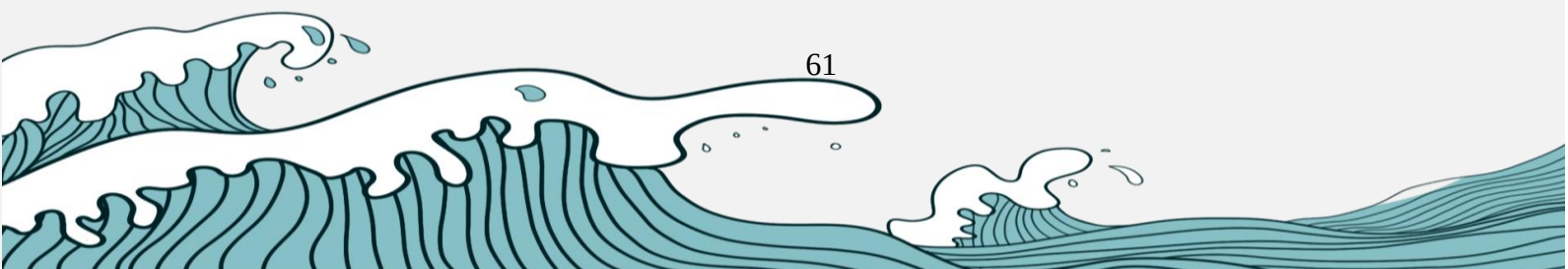
Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 12		Nilai PM SAKIP PPN Pengembangan			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
-	-	88	88,7	-	100,7

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai PM SAKIP PPN Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2024 sebesar 88 dan realisasi 88 atau sebesar 100,7%.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, Indikator Nilai PM SAKIP tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena merupakan Indikator Kinerja baru di PPN Pengembangan.



c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Nilai PM SAKIP PPN Pengembangan	88,7	88	100,7

Berdasarkan data tersebut, indikator Nilai PM SAKIP PPN Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 100,7%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 54. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
88,7	88,60	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 100%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya pemenuhan dokumen SAKIP setiap bulan serta dilakukan pemantauan secara berkala dan monitoring dan evaluasi setiap triwulan. Pemantauan dilakukan melalui rapat Kepala Pelabuhan dan Tim Pengelola Kinerja.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 55. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	100,80%	-	-	-	-	101%	302%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 0,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 101%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Kinerjaku sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

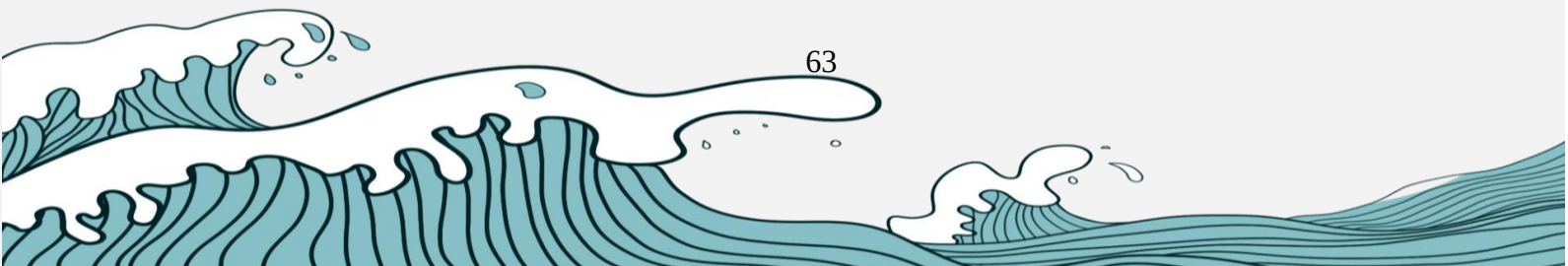
g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja yaitu Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja dalam pengelolaan kinerja dan penganggaran sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Mengintegrasikan aplikasi kinerjaku untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

IKU- 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang di ukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Realisasi IKU ini diukur dan dilaporkan berkala setiap bulan untuk ASN di setiap Subkor di PPN Pengembangan. IKU ini didukung oleh anggaran penyusunan administrasi perencanaan dan pengembangan SDM aparatur.

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN.



Tabel 56. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 13		Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
84	93,53	87	90,45	96,70	103,96

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2025 sebesar 87 dan realisasi nya yaitu 90,45 atau sebesar 103,96%.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 96,70%. Realisasi tahun 2025 sebesar 90,45 sedangkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 93,53. Hal ini disebabkan karena pegawai PPPK mulai masuk dalam perhitungan IP ASN dengan kualifikasi Pendidikan yang beragam seperti SMA dan S1/D4.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra**Tabel 57. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	90,45	87	103,96

Berdasarkan data tersebut, indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 103,96%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 58. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
90,45	90,84	99,5

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 99,5%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

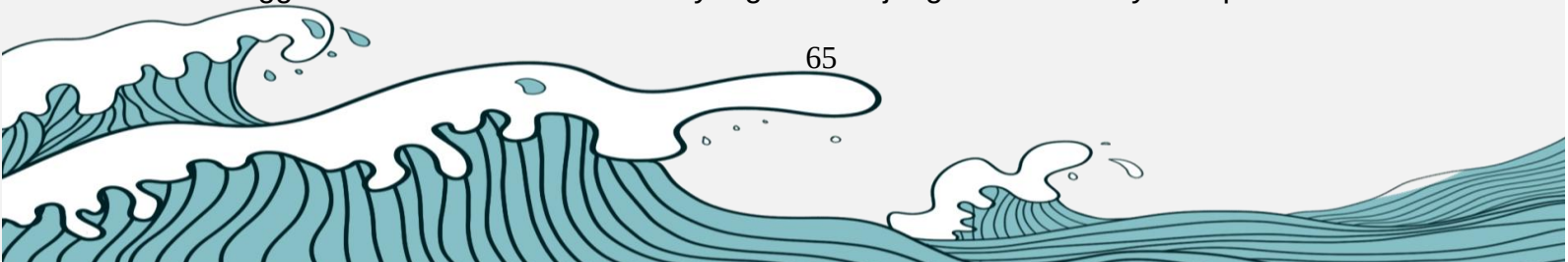
Indikator kinerja ini pada tahun 2045 telah mencapai target yang berupa kualifikasi yaitu Pendidikan. Kemudian kompetensi berupa Diklat 20JP, Seminar dan Diklat Fungsional, Kemudian penilaian SKP dan hukuman disiplin.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 59. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	103,97%	11.925.067.000	11.866.538.093	12.397.957.588	531.419.495	4%	61%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 11.866.538.093,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 4%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Indeks



Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian kepegawaian dan seluruh pegawai sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN yang sudah ada dalam RKA-K/L yaitu kegiatan peningkatan, pengembangan dan pembinaan pegawai merupakan kegiatan yang menunjang kinerja.

Dalam penilaian kompetensi pejabat struktural lingkup UPT PPN Pengembangan, terdapat 12 komponen standar kompetensi yakni sebagai berikut :

(1) Integritas dengan kriteria : (a) Konsisten dan berpegang pada etika dan tata nilai organisasi yang berlaku, (b) Secara terbuka menyatakan pandangan tentang ketidak etisan meskipun hal itu akan merusak hubungan kerjanya, (c) Mengajak orang lain untuk membangun kepercayaan dan berkerja sesuai dengan etika organisasi yang berlaku, (d) Membangun pola cata kerja atau iklim kerja yang kondusif dengan memberikan suasana yang dapat menumbuhkembangkan saling percaya dan (e) Menjadi contoh bagi orang lain dalam bertindak/bekerja sesuai dengan nilai-nilai dan etika kerja.

(2) Kepemimpinan dengan kriteria : (a) Memberikan Penjelasan Kepada Tim Kerja, (b) Melakukan bimbingan kepada tim kerja, (c) Pendelegasian tugas dan wewenang, (d) Pengorganisasian sumber daya yang ada dan (e) Membangun situasi yang kondusif.

(3) Perencanaan pengorganisasian dengan kriteria : (a) Mengetahui jenis kegiatan berdasarkankebutuhan organisasi, (b) Menentukan skala prioritas kegiatan kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan, (c) Memprediksi permasalahan dan menyusun tahapan penyelesaian masalah yang timbul, (d) Menggunakan penyelesaian secara sistimatis dalam menghadapi masalah dan membuat alternatif-alternatif untuk meningkatkan kinerja dan (e) Merumuskantindakan jangka panjang sesuai dengan tujuan organisasi.

(4) Kerjasama, dengan kriteria : (a) Bersikap pasif dalam kelompok. Mendukung tujuan dan keputusan kelompok dengan cara menyelesaikan tugas secara bersama. Berpartisipasi dengan cara memberikan kontribusi. Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. Aktif memberikan semangat rekan/anggota tim untuk



meningkatkan produktivitas kelompok.

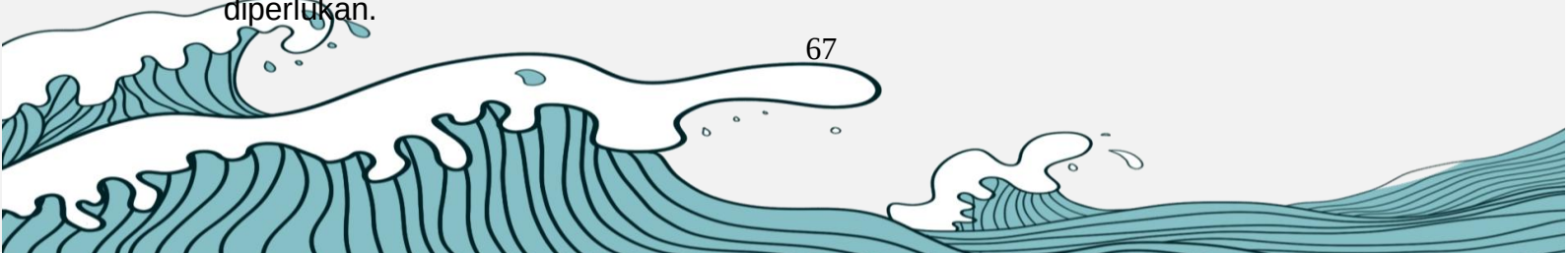
(5) Fleksibilitas berpikir, dengan kriteria : (a) Tidak mampu menerima pandangan dari orang lain. Mengikuti alur pemikiran pandangan dari orang lain Berupaya mendapatkan pandangan dari berbagai pihak dalam menghadapi perubahan situasi. Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. Aktif memberikan semangat rekan/anggota tim untuk meningkatkan produktivitas kelompok.

(6) Berorientasi pada kualitas, dengan kriteria : (a) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, (b) Memperhatikan jalannya pelaksanaan tugas didukung dengan bahan yang benar, Mengamati prosedur kerja dengan cermat untuk mengantisipasi masalah yang timbul dan menetapkan standar kerja, (c) Membuat standar kerja baru untuk memperbaiki proses kerja agar efektif dan efisien. Mengawasi jalannya pekerjaan untuk menghindari kesalahan dengan membuat sistem pengawasan yang lebih efektif.

(7) Berorientasi pada pelayanan, dengan kriteria : (a) Memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku Memberikan pelayanan secara tepat dan tepat sesuai kebutuhan pelanggan, (b) Mengevaluasi kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan pelayanan, (c) Mengambil langkah-langkah antisipasi untuk memprediksi perubahan kebutuhan pelanggan. Mengembangkan metode baru dalam meningkatkan pelayanan.

(8) Manajemen Waktu dengan kriteria : (a) Melaksanakan pekerjaan yang sudah ada tanpa mempertimbangkan waktu yang disediakan, (b) Menyusun beberapa kegiatan yang akan dilakukan dengan menentukan batas waktu yang telah ditetapkan, (c) Memperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, (d) Menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan batasan waktu yang diperlukan dan (e) Menentukan prioritas pekerjaan disesuaikan dengan target waktu yang ada.

(9) Pengambilan keputusan dengan kriteria : (a) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, (b) Mengumpulkan informasi dan dukungan dari lingkungan dalam pengambilan keputusan, (c) Membuat keputusan penyelesaian masalah dengan telah mempertimbangkan konsekuensinya, (d) Menetapkan keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak dan (e) Memastikan pelaksanaan keputusan dengan memantau hasil-hasil dan membuat penyesuaian- penyesuaian yang diperlukan.



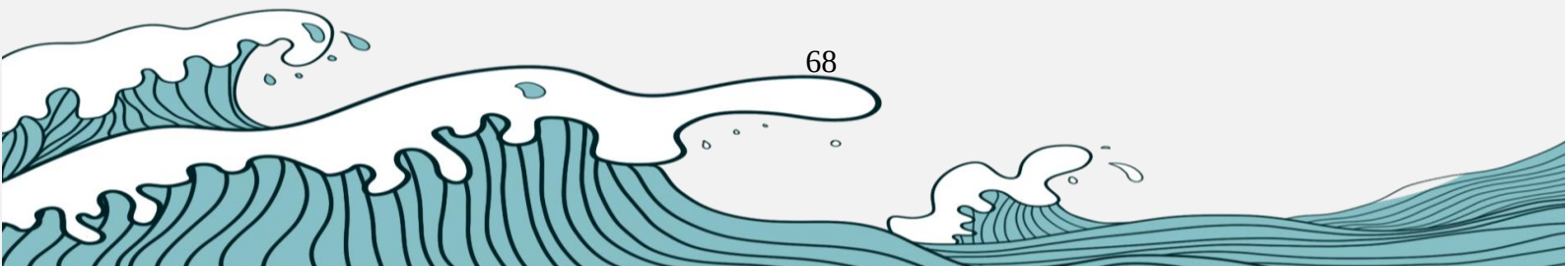
(10) Pengaturan kerja dengan kriteria : (a) Mengenali tugas/pekerjaan yang lebih penting dan kurang penting, (b) Memastikan perlengkapan yang terkait dengan pekerjaan telah tersedia sesuai kebutuhan, (c) Menyusun alokasi dan penggunaan waktu yang efektif untuk penyelesaian pekerjaan, (d) Mengkoordinasi antara perencanaan kerja orang lain dan diri sendiri untuk menghindari masalah dan (e) Memanfaatkan berbagai sumber yang ada secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah.

(11) Kepemimpinan strategis

(12) Membangun hubungan kerja strategis. Selain penilaian kompetensi juga ada penilaian terhadap tingkat kualifikasi pendidikan, kinerja serta disiplin yang artinya melihat pegawai apakah sudah pernah atau tidak pernah mendapat hukuman terkait kedisiplinan. Dari keempat komponen penilaian dihitung dengan membuat rata – rata yang menghasilkan indeks profesionalitas dari ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.

IKU- 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).



Tabel 60. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 14		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
-	-	76	100	-	131,57

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

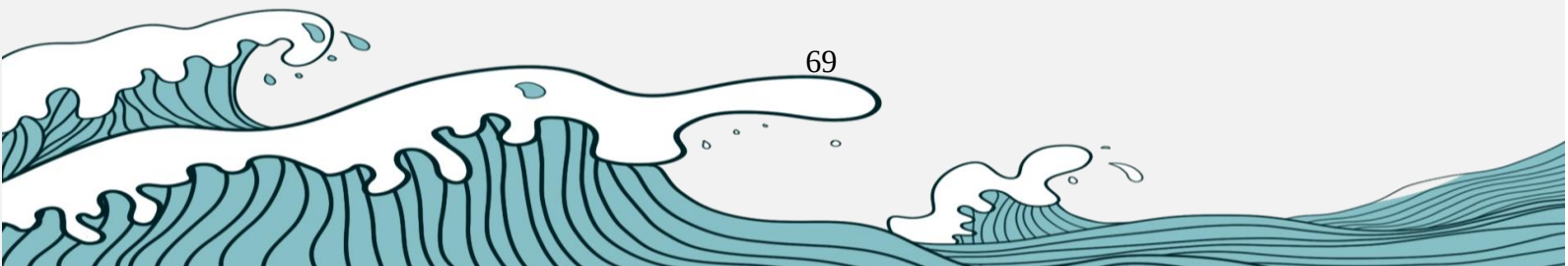
Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 131,57%. Target tahun 2025 sebesar 76 persen dengan realisasi sebesar 100 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena merupakan Indikator Kinerja baru di PPN Pengembangan.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra**Tabel 61. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	100	76	131,57



Berdasarkan data tersebut, indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 131,57%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 62. Perbandingan dengan Satker Lain

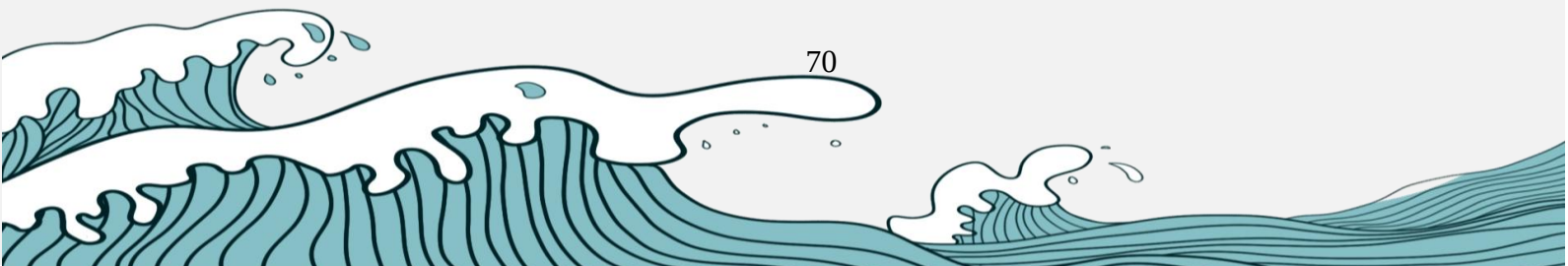
Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
100	100	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 100%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain:

- Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa
- Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
- Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu;
- Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 63. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	131,58%	94.680.000	94.679.670	124.578.947	29.899.277	32%	129%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 94.679.670,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 32%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian pengadaan barang dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan ini dapat ditunjang oleh penambahan SDM sebagai anggota Pokja sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja.

IKU- 15 Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Pengembangan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:



- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Tabel 64. Rincian Capaian Indikator

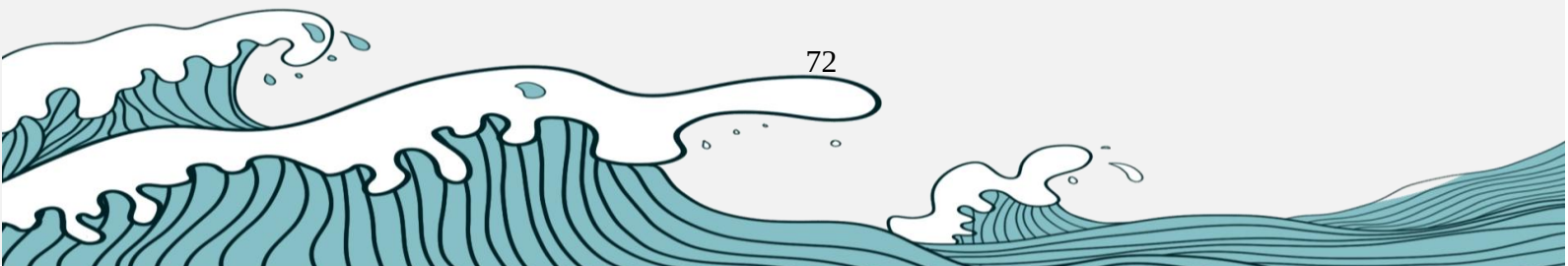
Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 15		Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
-	-	81	100	-	123,4

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 123,4%. Target tahun 2025 sebesar 81 persen dan realisasi yaitu 100 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, Indikator Persentase Pengelolaan BMN tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena merupakan Indikator Kinerja baru di PPN Pengembangan.



c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 65. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	100	81	123,4

Berdasarkan data tersebut, indikator Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 123,4%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 66. Perbandingan dengan Satker Lain

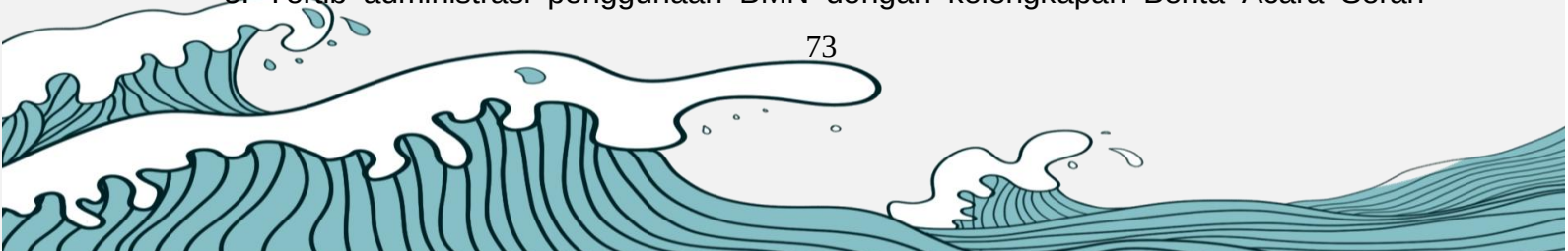
Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
100	97,50	102,5

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 102,5%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IK dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain:

- Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah



Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;

f. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 67. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	123,46%	2.160.000	2.160.000	2.666.667	506.667	23%	109%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen sebesar Rp 2.160.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 23%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian pengelola BMN dan persediaan dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya adalah menambah pengelola Barang Milik Negara untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang asset milik negara serta melaksanakan pelaporan asset secara tepat dan akurat.

IK- 16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Satker dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi



dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap triwulannya dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada *dashboard* Om- SPAN Kementerian Keuangan.

Tabel 68. Rincian Capaian Indikator

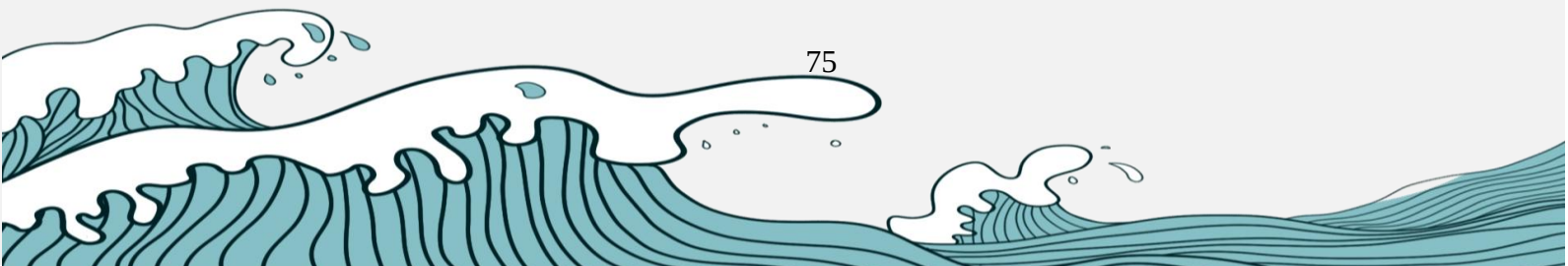
Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
93,76	96,66	92	99,98	103,43	108,56

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 108,56%. Target tahun 2025 sebesar 92 dan realisasi sebesar 99,88.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 103,43%. Realisasi tahun 2025 sebesar 99,88 dan 2024 sebesar 96,66.



c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 69. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	99,98	92	108,56

Berdasarkan data tersebut, indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 108,56%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 70. Perbandingan dengan Satker Lain

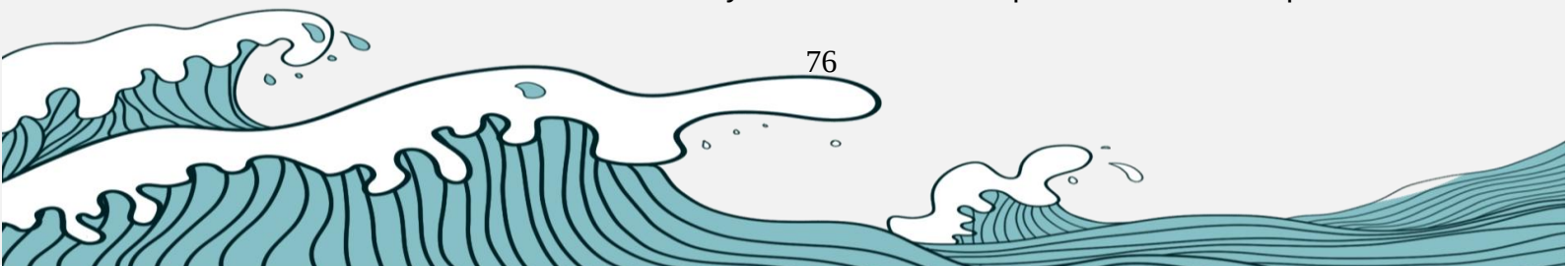
Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
99,98	100	99,98

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 99,98 %.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator kinerja pada tahun 2025 ditentukan oleh 7 (tujuh) indikator. Dari indikator tersebut, PPN Pengembangan mendapatkan nilai di atas target yang telah ditentukan terdiri dari Revisi DIPA dengan nilai 100, Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 100, Penyerapan Anggaran dengan nilai 100; Belanja Kontraktual dengan nilai 100, Penyelesaian Tagihan dengan nilai 100, Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 99,84, dan Capaian Output dengan nilai 100. Dari tujuh indikator yang dinilai, mendapatkan nilai 99,98 dan melebihi target tahun 2025 sebesar 92. Untuk mendapatkan nilai tersebut, terdapat beberapa proses yang dilakukan yaitu :

1. Meminimalkan revisi DIPA yang berkaitan dengan 14 jenis pagu tetap (maksimal dua kali dalam satu semester)
2. Deviasi Halaman III DIPA menyesuaikan antara perencanaan dan penarikan



anggaran sehingga meminimalkan selisih nilai anggaran yang telah direncanakan dan digunakan.

3. Penyerapan anggaran memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai target program yang telah ditentukan minimal 95 persen
4. Melakukan pendaftaran belanja kontraktual sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPPN maksimal 15 hari kerja setelah tanda tangan perjanjian/kontrak
5. Penyelesaian tagihan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan
6. Pengelolaan UP dan TUP dengan cara meminimalkan pengembalian anggaran yang telah ditambahkan di uang persediaan.
7. terselesaikannya semua kegiatan yang telah direncanakan sehingga target progres dan output kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 71. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	108,67%	18.572.000	18.489.200	20.182.919	1.693.719	9%	73%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 18.489.200,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9%. SDM yang menunjang terlaksananya Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian perencanaan, keuangan dan operator Sakti dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.



g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2025 Nilai IKPA dapat tercapai apabila terdapat Kerjasama yang baik dan dukungan pimpinan untuk lebih intens dalam melakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat bulanan. Kegiatan tersebut berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan Ditjen Perikanan Tangkap dan merupakan kegiatan penunjang untuk tercapai IKU.

IK-17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan adalah sebuah metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran pada tahun berjalan. NKPA merupakan instrumen evaluasi atas perencanaan anggaran tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rekomendasi guna meningkatkan kualitas perencanaan di masa depan. Pengukuran ini menitikberatkan pada dua aspek utama:

- Efektivitas: Seberapa jauh target kinerja yang direncanakan berhasil dicapai.
- Efisiensi: Seberapa optimal penggunaan anggaran dalam menghasilkan output tersebut.

Tabel 72. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
71	90	71,5	91,41	101,56	127,83

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 127,83%. Target tahun 2025 sebesar 71,5 dan realisasi yaitu 91,41.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 101,56%. Realisasi tahun 2025 sebesar 91,41 dan 2024 sebesar 90.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 73. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	91,41	71,5	127,83

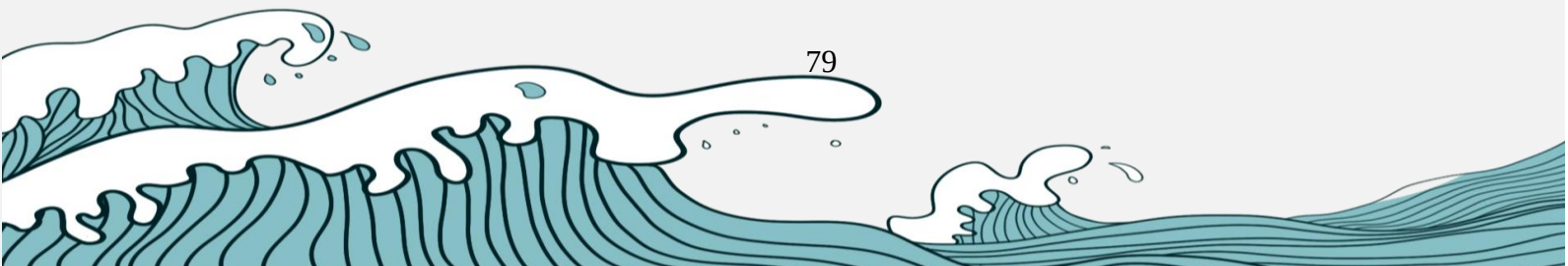
Berdasarkan data tersebut, indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 127,83%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 74. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
91,41	94,93	96,2

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 96,2 %.

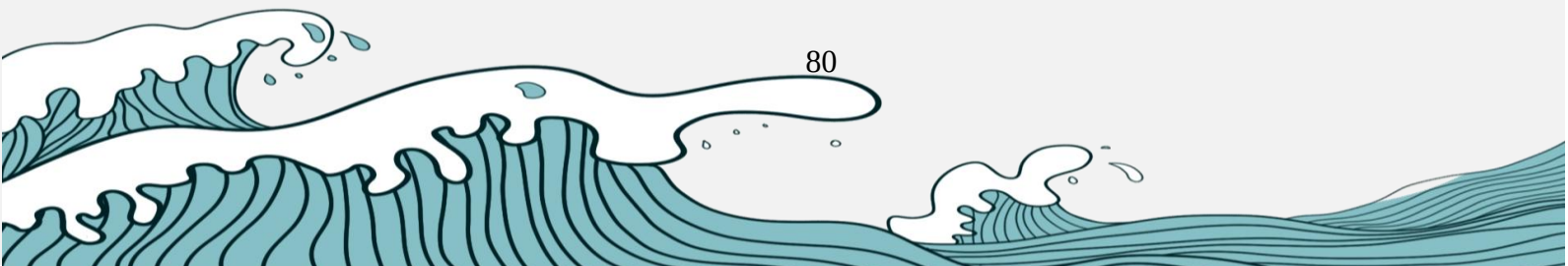


e. Analisis Keberhasilan *dan* Kegagalan

Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan anggaran Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan (633693) berada pada level Sangat Baik dengan Nilai Akhir sebesar 99.98. Keberhasilan ini didorong oleh nilai sempurna (100.00) pada hampir seluruh indikator utama:

- Kualitas Perencanaan Anggaran (100.00):
 - Revisi DIPA: Satker berhasil menjaga konsistensi perencanaan sehingga tidak ada pengurangan nilai dari sisi frekuensi revisi anggaran.
 - Deviasi Halaman III DIPA: Rencana penarikan dana bulanan dieksekusi dengan sangat presisi sesuai dengan realisasinya.
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran:
 - Penyerapan Anggaran (100.00): Realisasi belanja dilakukan secara optimal dan proporsional sepanjang tahun anggaran.
 - Penyelesaian Tagihan (100.00): Proses administrasi dari serah terima pekerjaan hingga penerbitan SPM dilakukan tepat waktu tanpa melampaui batas hari kerja yang ditentukan.
 - Belanja Kontraktual (100.00): Manajemen kontrak, mulai dari pendaftaran ke KPPN hingga penyelesaiannya, berjalan sangat disiplin.
- Kualitas Hasil (100.00):
 - Capaian Output: Satker mampu membuktikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berbanding lurus dengan target kinerja fisik yang dicapai.
- Kepatuhan Administratif:
 - Dispensasi SPM (0.00): Tidak ada pengajuan SPM yang melewati batas waktu (dispensasi) di akhir tahun, sehingga tidak ada nilai pengurang.

Satu-satunya indikator yang tidak mencapai nilai sempurna adalah Pengelolaan UP dan TUP, dengan nilai 99.84 (atau kontribusi bobot 9.98 dari maksimal 10.00). Meskipun nilai ini masih sangat tinggi, pengurangan sebesar 0.16 poin ini disebabkan oleh sisa TUP yang tidak terserap maksimal dan dilakukan pengembalian.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 75. Realisasi anggaran mendukung IKU

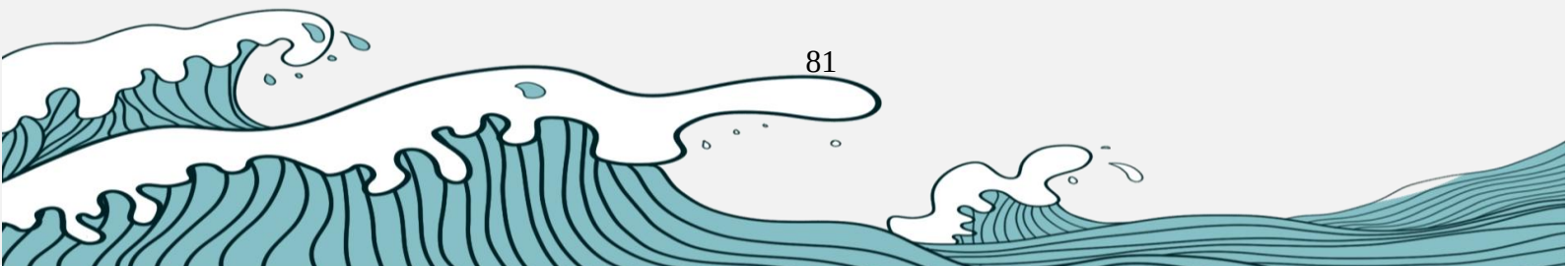
IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	127,85%	4.280.000	4.275.575	5.471.815	1.196.240	28%	120%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 4.275.575,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 28%. SDM yang menunjang terlaksananya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian perencanaan, keuangan dan operator SAKTI dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan data yang disajikan mengenai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) atau Indikator Kinerja 17 (IK-17) untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan tahun 2025, berikut adalah analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan serta aspek yang perlu diperhatikan:

1. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan



Capaian NKPA sebesar 91,41 dari target 71,5 (mencapai 127,83%) didukung oleh beberapa program dan kegiatan strategis berikut:

- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Pengelolaan Ditjen Perikanan Tangkap: Kegiatan ini merupakan program penunjang utama yang memastikan seluruh target IKU terpantau secara berkala.
- Intensifikasi Rapat Koordinasi Bulanan: Keberhasilan ini didorong oleh dukungan pimpinan melalui monitoring dan evaluasi yang intens dalam rapat bulanan untuk membedah kendala pelaksanaan anggaran secara tepat waktu.
- Optimalisasi Tim Kerja Dukungan Manajerial: Kinerja tim yang solid, terdiri dari bagian perencanaan, keuangan, serta operator SAKTI, memastikan proses input data dan pengelolaan administrasi keuangan berjalan efisien dan akurat.
- Akurasi Perencanaan Halaman III DIPA: Kegiatan sinkronisasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi di lapangan berjalan sangat baik (mencapai nilai sempurna 100,00), yang secara langsung meningkatkan kualitas perencanaan anggaran.
- Penerapan Aplikasi SAKTI secara Efisien: Penggunaan SDM (operator SAKTI) yang kompeten memungkinkan pengelolaan anggaran dilakukan secara sistematis, mendukung pencapaian efisiensi sebesar 28% dari pagu yang dialokasikan.

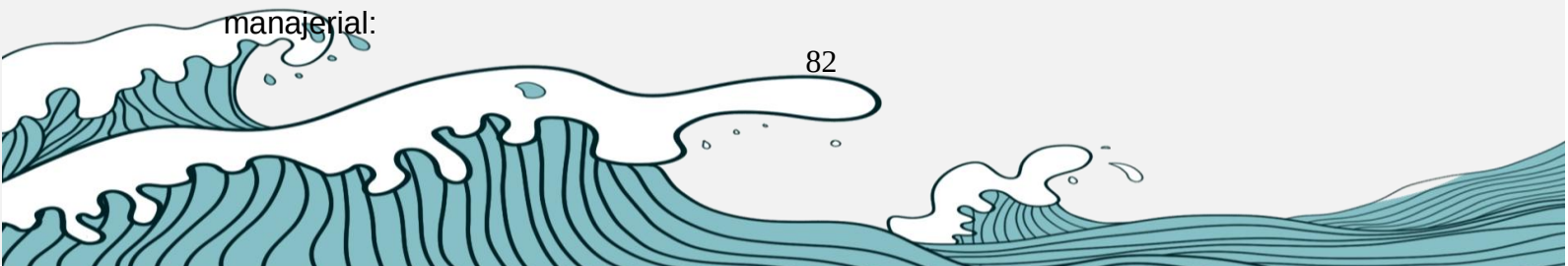
2. Analisis Faktor Penghambat atau Celah "Kegagalan"

Meskipun secara umum mencapai target yang sangat tinggi, terdapat catatan kecil yang berkaitan dengan ketepatan perencanaan jangka pendek:

- Ketidakakuratan Estimasi Tambahan Uang Persediaan (TUP): Terdapat sisa TUP yang tidak terserap maksimal sehingga harus dikembalikan ke kas negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam perencanaan kegiatan yang menggunakan mekanisme TUP, estimasi kebutuhan dana masih bisa dipertajam lagi agar sesuai dengan kebutuhan riil.
- Celah Nilai pada Pengelolaan UP/TUP: Meskipun kecil, nilai 99,84 pada indikator pengelolaan uang persediaan menunjukkan adanya sedikit keterlambatan atau ketidaktepatan dalam siklus pertanggungjawaban administratif.

3. Ringkasan Pencapaian Efisiensi

Program-program di atas tidak hanya berhasil secara output, tetapi juga secara manajerial:



- Realisasi Anggaran: Rp4.275.575,- dari alokasi Rp4.280.000,-.
- Nilai Efisiensi: Mencapai 120%, yang menunjukkan bahwa dengan anggaran yang minimal, Satker mampu menghasilkan kinerja perencanaan yang melampaui standar nasional (setara 100% dengan Satker pembanding seperti PPN Prigi).

Secara keseluruhan, kunci keberhasilan NKPA PPN Pengembangan terletak pada sinergi dukungan manajerial dan kedisiplinan monitoring bulanan yang mampu memitigasi potensi kegagalan sebelum berdampak pada nilai akhir kinerja

IKU-18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Tabel 76. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan			
Indikator Kinerja – 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)			
Tahun 2024		Tahun 2025		% Capaian Terhadap	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
88,30	89,76	88,5	92,58	103,14	104,61

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target Tahun 2025 sebesar 88,50 dan realisasi sebesar 92,58 atau 104,61%.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 103,14. Hal ini karena PPN Pengembangan telah melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan hasil evaluasi dari nilai SKM.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2025 terhadap Renstra

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase Perbandingan (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	88,5	92,58	104,61

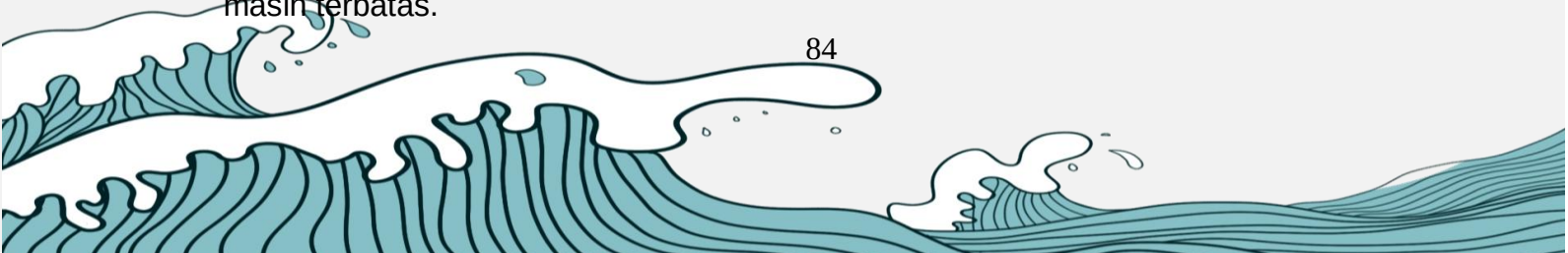
Berdasarkan data tersebut, indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target dalam renstra mencapai 104,61%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 78. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
92,58	93,54	98,97

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 98,97%. Faktor yang mempengaruhi adalah belum optimalnya pelaksanaan PTSA (Pelayanan Terpadu Satu Atap) di PPN Pengembangan, dan jumlah petugas pelayanan yang masih terbatas.



e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

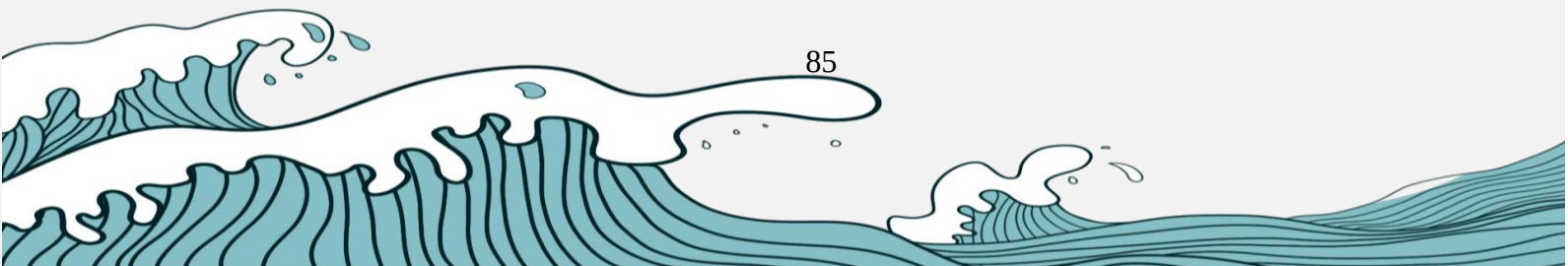
Penyelenggaraan survei dilakukan secara periodik untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan. Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi kinerja pelayanan sekaligus dasar penyusunan strategi peningkatan mutu layanan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan publik khususnya pada pelayanan kapal perikanan di PPN Pengembangan. Hasil dari SKM digambarkan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), melalui IKM tersebut dapat diketahui kategori pelayanan pada unit kerja tersebut. Salah satu cara agar nilai IKM optimal yaitu dengan mempertimbangkan masukan, saran, maupun kritik dari pengguna jasa untuk diterapkan pada perbaikan layanan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 79. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Pengembangan	104,61%	6.290.000	-	6.579.980	6.579.980	105%	312%

Pada Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 0,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 105%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Si Susan sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.



g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pelayanan publik agar nilai SKM tinggi yaitu dilaksanakan penyederhanaan prosedur pelayanan informasi publik melalui review standar pelayanan, serta peningkatan kapasitas dan responsivitas petugas layanan dengan cara menyelenggarakan pelatihan komunikasi publik dan etika pelayanan untuk meningkatkan kemampuan respon cepat dan komunikasi efektif petugas humas. Selain itu juga diadakan evaluasi dan monitoring berkala untuk memantau tren kepuasan pengguna layanan serta menindaklanjuti hasil survei secara berkelanjutan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada 2025 ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp Rp 257.674.183.000,- yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 80. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TW1 s/d TW 4 TAHUN 2025	
			TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	245.624.194.000	245.624.194.000	100,00%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	245.622.612.000	245.622.612.000	100,00%
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	3.680.000	3.680.000	100,00%
2338.ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	3.680.000	3.680.000	100,00%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	450.682.000	450.682.000	100,00%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	450.682.000	450.682.000	100,00%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	245.168.250.000	245.168.250.000	100,00%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	245.168.250.000	245.168.250.000	100,00%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1.582.000	1.582.000	100,00%
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	1.582.000	1.582.000	100,00%

2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	1.582.000	1.582.000	100,00%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.049.989.000	12.049.989.000	100,00%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.049.989.000	12.049.989.000	100,00%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	94.680.000	94.680.000	100,00%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	94.680.000	94.680.000	100,00%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	11.929.858.000	11.929.858.000	100,00%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	831.000	831.000	100,00%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.800.000	1.800.000	100,00%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.927.227.000	11.927.227.000	100,00%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]			
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal			
2342.EBB.971	Layanan Prasarana Internal			
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	2.599.000	2.599.000	100,00%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	2.599.000	2.599.000	100,00%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	22.852.000	22.852.000	100,00%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.280.000	4.280.000	100,00%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	18.572.000	18.572.000	100,00%

Dari pagu anggaran tersebut di atas, realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program kegiatannya telah terealisasi sebesar Rp 12.542.832.715 ,- atau 4,87 % dari total anggaran

Tabel 81. Realisasi Keuangan PPN Pengembangan s/d Tahun 2025

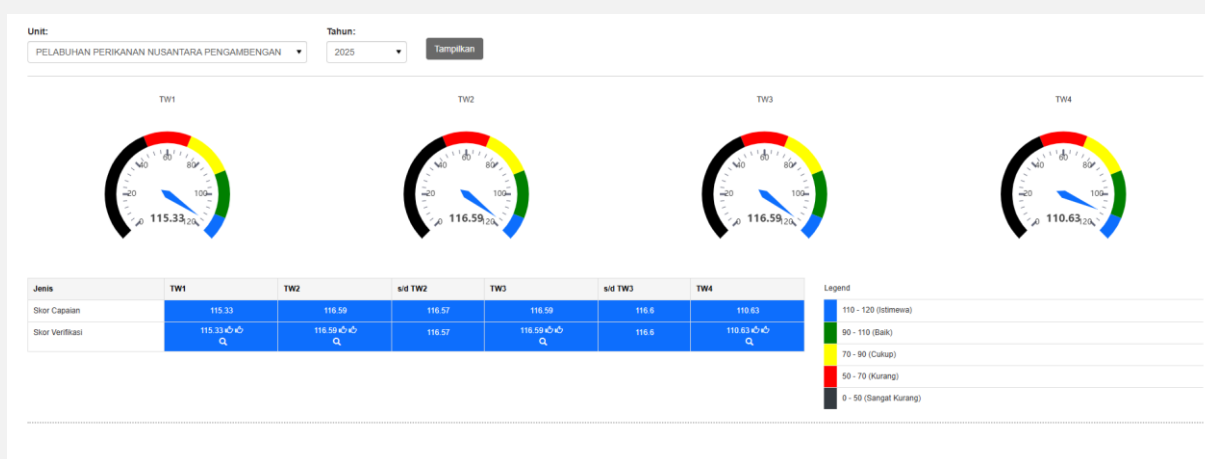
KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI TW 4 TAHUN 2025		
			REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	245.624.194.000	551.739.526	0,22%	0,22%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	245.622.612.000	550.186.526	0,22%	0,22%
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	3.680.000	3.680.000	100,00%	100,00%
2338.ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	3.680.000	3.680.000	100,00%	100,00%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	450.682.000	214.237.047	47,54%	47,54%

2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	450.682.000	214.237.047	47,54%	47,54%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	245.168.250.000	332.269.479	0,14%	0,14%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	245.168.250.000	332.269.479	0,14%	0,14%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	1.582.000	1.553.000	98,17%	98,17%
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	1.582.000	1.553.000	98,17%	98,17%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	1.582.000	1.553.000	98,17%	98,17%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.049.989.000	11.991.833.766	99,52%	99,52%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.049.989.000	11.991.833.766	99,52%	99,52%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	94.680.000	94.679.670	0,00%	100,00%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	94.680.000	94.679.670	0,00%	100,00%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	11.929.858.000	11.871.896.321	99,51%	99,51%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	831.000	657.881	0,00%	79,17%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.800.000	1.800.000	0,00%	100,00%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.927.227.000	11.869.438.440	99,52%	99,52%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]				
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal				
2342.EBB.971	Layanan Prasarana Internal				
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	2.599.000	2.493.000	0,00%	95,92%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	2.599.000	2.493.000	0,00%	95,92%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	22.852.000	22.764.775	99,62%	99,62%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.280.000	4.275.575	99,90%	99,90%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	18.572.000	18.489.200	99,55%	99,55%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp 257.674.183.000,- pada Tahun 2025, yang terealisasi sebesar Rp 12.542.832.715 ,- atau 4,87 % dari total target penyerapan anggaran pada Tahun 2025. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **110,63%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 3)

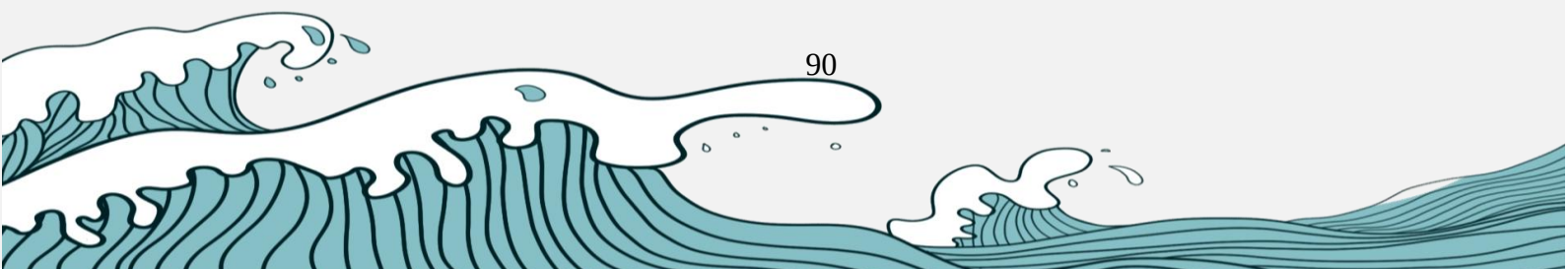


Gambar 3. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku PPN Pengembangan

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.1 Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Pengembangan (Rp Juta)
2. IKS.02.1 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
3. IKS.03.1 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)

4. IKS.03.2 Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
5. IKS.03.3 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
6. IKS.03.4 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
7. IKS.03.5 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
8. IKS.04.1 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
9. IKS.04.2 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
10. IKS.05.1 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
11. IKS.05.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
12. IKS.05.3 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
13. IKS.05.4 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)
14. IKS.05.5 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
15. IKS.05.6 Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
16. IKS.05.7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
17. IKS.05.8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
18. IKS.05.9 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)



Dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara pengembangan, terdapat kendala dan permasalahan, adapun permasalahan yang dialami adalah :

1. Ketidaktersediaan timbangan di Pelabuhan Binaan (Pelabuhan Sape NTB) sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan program PNBP Pasca Produksi.
2. Kurangnya kedisiplinan pegawai dalam melakukan presensi, seperti lupa absen saat pagi dan sore hari
3. Kurangnya kesadaran nahkoda kapal untuk melaporkan hasil tangkapan melalui aplikasi elogbook

B. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya

1. Telah diberikan teguran kepada pemilik kapal yang mangkrak dan karam, untuk dapat dilakukan pemindahan ataupun pengangkutan berupa surat pada tanggal 21 Oktober 2025.
2. Telah dilakukan koordinasi dengan PSDKP di level eselon 1 dan Probis level 3 di PPN Pengembangan telah berjalan dengan baik.

C. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab II di atas, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemberian timbangan di Pelabuhan Binaan (Pelabuhan Sape NTB) untuk mendukung pelaksanaan program PNBP Pasca Produksi
2. Memberikan teguran lisan dan tulisan bagi pegawai yang lupa presensi
3. Memberikan pendampingan cara melaporkan hasil tangkapan melalui aplikasi elogbook untuk nakhoda kapal

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025 ini disampaikan sebagai tolak ukur kinerja pelabuhan dan bahan kajian evaluasi serta koreksi dalam rangka pembangunan dan pengembangan unit kerja di masa yang akan datang.

